

**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN (RENJA) K/L  
BERDASARKAN PAGU ANGGARAN TA. 2023  
Hotel Ashley Tanah Abang, 31 Agustus 2022**

RENJA TA.2023									
DIVISI	Kode KRO/RO	Program/ Kegiatan/ KRO/ Indikator KRO/ RO/ Komponen Input	Indikator Komponen Input	Volume / Target	Satuan	PAGU ALOKASI			Keterangan/ Formula
						SEMULA	MENJADI	SELISIH	
	115.CQ	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI				5.640.720.000.000	5.640.720.000.000	0	
	4358	FASILITASI PENGAWASAN PEMILU				31.750.000.000	31.750.000.000	0	
	4358.ABC	Kebijakan Bidang Politik		10	Rekomendasi Kebijakan, Kajian	13.200.000.000	13.200.000.000	0	
		<b>Indikator KRO :</b>							
		01 Jumlah Kebijakan Program dan Strategi Pengawasan Pemilu yang disusun sesuai dengan ketentuan		10	Rekomendasi Kebijakan, Kajian				menghasilkan produk s.d disosialisasikan
		02 Jumlah Penyusunan Penilaian Kepuasan Pelayanan Teknis Pengawasan yang sesuai dengan ketentuan		7	Rekomendasi Kebijakan, Kajian				
	4358.ABC.001	Kebijakan Program dan Strategi Pengawasan Pemilu		10	Rekomendasi Kebijakan, Kajian	10.500.000.000	10.500.000.000	0	
		<b>Komponen Input :</b>							
Pencegahan, Parmas, dan Humas		101 Penyusunan kebijakan program dan strategi teknis pengawasan	Jumlah kebijakan program dan strategi teknis pengawasan	1	Rekomendasi Kebijakan, Kajian	1.375.000.000	1.375.000.000	0	IKU Karo Fasilitasi Pengawasan Pemilu -program dan strategi pengawasan pemilu yang menjadi kebijakan nasional
Penanganan Pelanggaran dan Datin		102 Penyusunan kebijakan program dan strategi penanganan pelanggaran	Jumlah kebijakan program dan strategi penanganan pelanggaran	1	Rekomendasi Kebijakan, Kajian	1.375.000.000	1.375.000.000	0	IKU Karo Fasilitasi Penanganan Pelanggaran Pemilu -laporan penanganan pelanggaran yang berbasis IT
Hukum dan Penyelesaian Sengketa		103 Penyusunan kebijakan program dan strategi penyelesaian sengketa proses	Jumlah kebijakan program dan strategi penyelesaian sengketa proses	1	Rekomendasi Kebijakan, Kajian	1.375.000.000	1.375.000.000	0	- 2022: penyusunan dan pembahasan SOP, perbawasu dan juknis bentuk kegiatan fgd' - 2023: 10 kali fgd review sop juknis dan perbawasu; - 2024: 50 kali fgd pembahasan permohonan penyelesaian sengkelayang masuk ke bawasu RI untuk sengketa pemilu dan pemilihan
Pencegahan, Parmas, dan Humas		104 Penyusunan kebijakan program dan strategi pencegahan dan partisipasi masyarakat	Jumlah kebijakan program dan strategi pencegahan dan partisipasi masyarakat	5	Rekomendasi Kebijakan, Kajian	1.375.000.000	1.375.000.000	0	
Pencegahan, Parmas, dan Humas		105 Penyusunan dan publikasi jurnal adhyasta pemilu	Jumlah edisi jurnal adhyasta pemilu	1	Edisi Jurnal	2.000.000.000	2.000.000.000	0	
Ketua		106 Penyusunan kajian, kebijakan strategis	Jumlah kajian dan kebijakan strategis	1	Kajian, Kebijakan Strategis	3.000.000.000	3.000.000.000	0	
	4358.ABC.002	Penilaian Kepuasan Pelayanan		7	Rekomendasi Kebijakan, Kajian	2.700.000.000	2.700.000.000	0	
		<b>Komponen Input :</b>							
Pencegahan, Parmas, dan Humas		101 Penyusunan Indeks pengawasan pemilu	Jumlah dokumen Indeks pengawasan Pemilu	1	Rekomendasi Nilai	200.000.000	200.000.000	0	IKU Deputi Bidang Teknis (Predikat Nilai "Baik")
Pencegahan, Parmas, dan Humas		102 Penyusunan Indeks Pengetahuan dan Kesadaran Stakeholder serta masyarakat dalam pengawasan pemilu	Jumlah dokumen Indeks Pengetahuan dan Kesadaran Stakeholder serta masyarakat dalam pengawasan pemilu	1	Rekomendasi Nilai	200.000.000	200.000.000	0	IKU Karo Fasilitasi Pengawasan Pemilu (Predikat Nilai "Baik")
Penanganan Pelanggaran dan Datin		103 Penyusunan Indeks Penanganan Pelanggaran	Jumlah dokumen Indeks Penanganan Pelanggaran	1	Rekomendasi Nilai	200.000.000	200.000.000	0	IKU Karo Fasilitasi Penanganan Pelanggaran Pemilu (Predikat Nilai "Baik"), penilaian meliputi: -penanganan pelanggaran administrasi dan penanganan pelanggaran pemilu -aksesibitas, kerangka hukum, dan teknologi informasi
Hukum dan Penyelesaian Sengketa		104 Penyusunan indeks kepuasan layanan penyelesaian sengketa proses	Jumlah dokumen indeks kepuasan layanan penyelesaian sengketa proses	1	Rekomendasi Nilai	200.000.000	200.000.000	0	
Pencegahan, Parmas, dan Humas		105 Penyusunan Indeks pencegahan dan partisipasi masyarakat	Jumlah dokumen Indeks pencegahan dan partisipasi masyarakat	1	Rekomendasi Nilai	200.000.000	200.000.000	0	
Pencegahan, Parmas, dan Humas		106 Penyusunan Indeks Pengetahuan dan Kesadaran Stakeholder serta masyarakat dalam pencegahan dan partisipasi masyarakat	Jumlah dokumen Indeks Pengetahuan dan Kesadaran Stakeholder serta masyarakat dalam pencegahan dan partisipasi masyarakat	1	Rekomendasi Nilai	200.000.000	200.000.000	0	
Pencegahan, Parmas, dan Humas		107 Penyusunan indeks kerawanan pemilu	Jumlah dokumen indeks kerawanan pemilu	1	Dokumen	1.500.000.000	1.500.000.000	0	
	4358.AEC	Kerja Sama		20	Kesepakatan, Dokumen, Kegiatan	1.750.000.000	1.750.000.000	0	
		<b>Indikator KRO :</b>							
		01 Jumlah Kesepakatan Kerjasama dan Hubungan Antar Lembaga yang disepakati dan dilandatangani		20	Kesepakatan, Dokumen, Kegiatan				
	4358.AEC.001	Kerjasama Antar Lembaga		20	Kesepakatan, Dokumen, Kegiatan	1.750.000.000	1.750.000.000	0	
		<b>Komponen Input :</b>							
Pencegahan, Parmas, dan Humas		101 Koordinasi kerjasama dan hubungan antar lembaga	Jumlah kesepakatan/ kesepahaman antar lembaga	20	Kesepakatan/ kesepahaman	1.000.000.000	1.000.000.000	0	
Pencegahan, Parmas, dan Humas		102 Identifikasi kebutuhan kerjasama antar Lembaga	Jumlah dokumen identifikasi kebutuhan kerjasama antar lembaga	1	Dokumen	750.000.000	750.000.000	0	
	4358.BAH	Pelayanan Publik Lainnya		3	Layanan, Bidang, Dokumen, Bulan	8.950.000.000	8.950.000.000	0	
		<b>Indikator KRO :</b>							
		01 Persentase jumlah penanganan pelanggaran yg dilayani/diproses tepat waktu, netral, dan sesuai dengan SOP		100	%				

		02	Persentase jumlah penyelesaian sengketa proses yg dilayani/dproses tepat waktu, netral, dan sesuai dengan SOP		100	%				
	4358.BAH.001		Layanan Penanganan Pelanggaran		2	Layanan, Bidang, Dokumen, Bulan	4.450.000.000	4.450.000.000	0	
			<b>Komponen Input :</b>							
Penanganan Pelanggaran dan Datin		101	Peningkatan layanan kualitas penanganan pelanggaran	Jumlah kegiatan dalam peningkatan kualitas layanan penanganan pelanggaran	1	Laporan Kegiatan	1.950.000.000	1.950.000.000	0	Rakor, Raker, FGD, Survey, Diskusi Forum Ahli Pemilu
Penanganan Pelanggaran dan Datin		102	Fasilitasi dan pembinaan penyelenggaraan penanganan pelanggaran	Jumlah laporan kegiatan fasilitasi dan pembinaan penyelenggaraan penanganan pelanggaran	1	Laporan	2.500.000.000	2.500.000.000	0	Supervisi, Rakor
	4358.BAH.002		Layanan Penyelesaian Sengketa Proses		1	Layanan, Bidang, Dokumen, Bulan	4.500.000.000	4.500.000.000	0	
			<b>Komponen Input :</b>							
Hukum dan Penyelesaian Sengketa		101	Fasilitasi dan pembinaan penyelesaian sengketa proses	Jumlah kegiatan fasilitasi dan pembinaan penyelesaian sengketa proses	1	laporan	4.500.000.000	4.500.000.000	0	- 2022: 5 kali rakomias 45 kali supervisi sosialisasi sop, perbawaslu dan juknis ke kab/kota sampling; - 2023: 2 rakomias permantapan penyelesaian sengketa pemilihan dan pemilu, 90 kali supervisi sosialisasi sop perbawaslu dan juknis provinsi kabupaten kota; - 2024: 70 kali pendampingan pemilu dan pemilihan ke provinsi kabupaten kota
	4358.BDB		Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga		448	Lembaga, Unit Kerja, Tim	4.000.000.000	4.000.000.000	0	
			<b>Indikator KRO :</b>							
		01	Jumlah pembentukan dan beroperasinya pusat pendidikan dan latihan pengawas partisipatif		448	Daerah				
RPJMN	4358.BDB.001		Pusat Pendidikan Pengawasan Pemilu Partisipatif		448	Lembaga, Unit Kerja, Tim	4.000.000.000	4.000.000.000	0	
			<b>Komponen Input :</b>							
Pencegahan, Parmas, dan Humas		101	Pembentukan pusat pendidikan pengawasan pemilu partisipatif	Jumlah pembentukan dan beroperasinya pusat pendidikan dan latihan pengawasan pemilu yang partisipatif	448	Daerah	4.000.000.000	4.000.000.000	0	Target dari Biro = 66 RPJMN : (2018=4), (2019=15), (2020=148), (2021=248), (2022=348), (2023=448), (2024=549)
	4358.BKC		Pemantauan Lembaga		7	Laporan	3.850.000.000	3.850.000.000	0	
			<b>Indikator KRO :</b>							
		01	Jumlah laporan Hasil Pencegahan/ Pengawasan Pemilu, Pengawasan Siber dan Pengawasan Daftar Pemilih Berkelanjutan		7	Laporan				
	4358.BKC.001		Laporan Hasil Pencegahan/ Pengawasan Pemilu		7	Laporan	3.850.000.000	3.850.000.000	0	
			<b>Komponen Input :</b>							
Pencegahan, Parmas, dan Humas		101	Pengawasan penyusunan daftar pemilih berkelanjutan	Jumlah laporan pengawasan daftar pemilih berkelanjutan	1	Laporan	350.000.000	350.000.000	0	Pengawasan penyusunan daftar pemilih berkelanjutan pada tahun 2021 s.d 2024
Pencegahan, Parmas, dan Humas		102	Pengelolaan dan analisis data pengawasan	Jumlah data hasil analisis pengawasan	1	Laporan	300.000.000	300.000.000	0	Penguatan Pengawasan media sosial
Pencegahan, Parmas, dan Humas		103	Pengawasan siber dan isu khusus	Jumlah pengelolaan data pengawasan siber dan isu khusus	1	Laporan	300.000.000	300.000.000	0	1. Laporan koordinasi pengawasan siber dan isu khusus dgn stakeholder terkait 2. penguatan kapasitas pengawasan siber dan isu khusus 3. pembangunan dan pemeliharaan aplikasi pengawasan pemilu berbasis siber 4. Supervisi terkait siber dan isu khusus
Pencegahan, Parmas, dan Humas		104	Fasilitasi Akreditasi Pemantau Pemilu	Jumlah laporan Akreditasi Pemantau Pemilu	1	Laporan	500.000.000	500.000.000	0	1. Pemantau Pemilu yang terakreditasi
Pencegahan, Parmas, dan Humas		105	Pengelolaan hasil pengawasan dugaan pelanggaran	Jumlah laporan pengelolaan hasil pengawasan dugaan pelanggaran	1	Laporan	350.000.000	350.000.000	0	<b>IKU Karo Fasilitasi Pengawasan</b> - penurunan jumlah dugaan pelanggaran berdasarkan laporan hasil pengawasan Formula: --Jumlah dugaan pelanggaran berdasarkan laporan hasil pengawasan tahun (N - 1) - jumlah dugaan pelanggaran berdasarkan laporan hasil pengawasan tahun N dibagi jumlah dugaan pelanggaran berdasarkan laporan hasil pengawasan tahun (N - 1) x 100 -- Tahapan pemilu dibandingkan dengan Tahapan Pemilu sebelumnya -- Tahapan pilkada dibandingkan dengan Tahapan pilkada sebelumnya
Pencegahan, Parmas, dan Humas		106	Fasilitasi dan pembinaan penyelenggaraan pengawasan	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan penyelenggaraan pengawasan	1	Laporan	700.000.000	700.000.000	0	Supervisi dan monitoring pengawasan pemilu: 1. Pengawasan 2. Hubal 3. Pengawasan partisipatif 4. pengawasan siber
Pencegahan, Parmas, dan Humas		107	Fasilitasi pengawasan partisipatif	Jumlah laporan kegiatan pengawasan partisipatif	1	Laporan Kegiatan	500.000.000	500.000.000	0	<b>IKU Karo Fasilitasi Pengawasan</b> - Sosialisasi kepada berbagai pihak baik Peserta Pemilu/Pemilihan, Masyarakat, dan Stakeholder guna memberikan pemahaman terkait dengan regulasi dan peran partisipatif masyarakat dan stakeholder - peningkatan keterlibatan stakeholder dalam pengawasan partisipatif
Pencegahan, Parmas, dan Humas		108	Pengelolaan dan analisis data pencegahan dan partisipasi masyarakat	Jumlah data hasil analisis pencegahan dan partisipasi masyarakat		Laporan	350.000.000	350.000.000	0	
Pencegahan, Parmas, dan Humas		109	Fasilitasi dan pembinaan penyelenggaraan pencegahan, partisipasi masyarakat, dan hubungan antar lembaga	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan penyelenggaraan pencegahan, partisipasi masyarakat, dan hubungan antar lembaga		Laporan	500.000.000	500.000.000	0	
PROVINSI & Kab/Kota	5245		TEKNIS PENYELENGGARAAN PENGAWASAN PEMILU OLEH BAWASLU PROVINSI DAN BAWASLU KABUPATEN/KOTA				82.870.000.000	82.870.000.000	0	
	5245.BAH		Pelayanan Publik Lainnya		1.096	Layanan, Bidang, Dokumen, Bulan	22.220.000.000	18.514.926.000	-3.705.074.000	
			<b>Indikator KRO :</b>							

		01	Persentase jumlah penanganan pelanggaran yg dilayani/diproses tepat waktu, netral, dan sesuai dengan SOP oleh Bawaslu Provinsi dan Kab./Kota		100	%					-Kasus/pelaporan/perkara yang ditangani dan diselesaikan
		02	Persentase jumlah penyelesaian sengketa proses yg dilayani/diproses tepat waktu, netral, dan sesuai dengan SOP oleh Bawaslu Provinsi dan Kab./Kota		100	%					-Kasus/pelaporan/perkara yang ditangani dan diselesaikan
	5245.BAH.001		Layanan penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota		1.096	Layanan, Bidang, Dokumen, Bulan	22.220.000.000	18.514.926.000	-3.705.074.000		
			<b>Komponen Input :</b>								
Penanganan Pelanggaran dan Datin		201	Pembinaan/pelaksanaan penanganan dan penindakan pelanggaran (Provinsi)	Jumlah laporan pembinaan/pelaksanaan penanganan dan penindakan pelanggaran	34	Laporan	3.400.000.000	3.334.442.000	-65.558.000		1. Laporan pembinaan/pendampingan ke kab/kota semesteran 2. laporan penyelenggaraan penanganan pelanggaran
Hukum dan Penyelesaian Sengketa		202	Pembinaan/pelaksanaan penyelesaian sengketa proses (Provinsi)	Jumlah laporan pembinaan/pelaksanaan penyelesaian sengketa proses	34	Laporan	3.400.000.000	3.351.834.000	-48.166.000		1. Laporan pembinaan/pendampingan ke kab/kota semesteran 2. laporan penyelenggaraan penyelesaian sengketa proses
Penanganan Pelanggaran dan Datin		301	Koordinasi penanganan pelanggaran (Kab./Kota)	Jumlah laporan semesteran penyelenggaraan penanganan dan penindakan pelanggaran.	514	Laporan	7.710.000.000	5.707.115.000	-2.002.885.000		1. Laporan koordinasi kab/kota semesteran
Hukum dan Penyelesaian Sengketa		302	Koordinasi penyelesaian sengketa proses (Kab./Kota)	Jumlah laporan semesteran penyelenggaraan penyelesaian sengketa proses	514	Laporan	7.710.000.000	6.121.535.000	-1.588.465.000		1. Laporan koordinasi kab/kota semesteran
	5245.BDB		Fasilitas dan Pembinaan Lembaga		34	Lembaga, Unit Kerja, Tim	5.950.000.000	4.351.069.000	-1.598.931.000		
			<b>Indikator KRO :</b>								
		01	Jumlah daerah yang mengembangkan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Pemilu Partisipatif		34	Daerah					~Jumlah provinsi/daerah
RPJMN	5245.BDB.001		Pengembangan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Pemilu Partisipatif		34	Lembaga, Unit Kerja, Tim	5.950.000.000	4.351.069.000	-1.598.931.000		
			<b>Komponen Input :</b>								
Pencegahan, Parmas, dan Humas		201	Pengembangan pusat pendidikan dan pelatihan pengawasan pemilu partisipatif (Provinsi)	Jumlah daerah yang mengembangkan pusat pendidikan dan pelatihan pengawasan pemilu partisipatif	34	Daerah	5.950.000.000	4.351.069.000	-1.598.931.000		34 provinsi +18 satker K/K baru
	5245.BKC		Pemantauan Lembaga		2.740	Laporan	54.700.000.000	60.004.005.000	5.304.005.000		
			<b>Indikator KRO :</b>								
		01	Jumlah laporan Hasil Pengawasan, Pengawasan Siber dan Pengawasan Daftar Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota		2.740	Laporan					
	5245.BKC.001		Laporan Hasil Pencegahan/ Pengawasan Pemilu di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota		2.740	Laporan	54.700.000.000	60.004.005.000	5.304.005.000		
			<b>Komponen Input :</b>								
Pencegahan, Parmas, dan Humas		201	Pengawasan pemilu partisipatif (Provinsi)	Jumlah laporan pengawasan pemilu partisipatif	34	Laporan	3.400.000.000	3.222.046.000	-177.954.000		1 laporan@34 provinsi
Pencegahan, Parmas, dan Humas		202	Fasilitas, koordinasi, dan pelaporan (Provinsi)	Jumlah laporan semesteran fasilitas dan koordinasi menghadiri undangan Bawaslu RI dan Instansi terkait	34	Laporan	5.100.000.000	9.965.821.000	4.865.821.000		laporan semester
Pencegahan, Parmas, dan Humas		203	Evaluasi pelaksanaan pengawasan (Provinsi)	Jumlah laporan evaluasi pelaksanaan pengawasan	34	Laporan	2.550.000.000	1.974.945.000	-575.055.000		
Pencegahan, Parmas, dan Humas		204	Pemutakhiran data pemilih tetap berkelanjutan (Provinsi)	Jumlah kegiatan pemutakhiran data pemilih tetap berkelanjutan	34	Laporan	3.400.000.000	1.505.652.000	-1.894.348.000		- IDI variabel Hak Memilih & Dipilih (Indikator Nomor 11); - laporan triwulan
Pencegahan, Parmas, dan Humas		205	Fasilitas penguatan pemahaman kepemiluan kepada disabilitas (Provinsi)	Jumlah fasilitas penguatan pemahaman kepemiluan kepada disabilitas	34	Laporan	1.700.000.000	1.357.811.000	-342.189.000		- IDI variabel Hak Memilih & Dipilih (Indikator Nomor 12)
Pencegahan, Parmas, dan Humas		301	Pengawasan pemilu partisipatif (Kab./Kota)	Jumlah laporan pengawasan pemilu partisipatif	514	Laporan	10.280.000.000	9.742.228.000	-537.772.000		1 laporan@514 KK
Pencegahan, Parmas, dan Humas		302	Fasilitas, koordinasi, dan pelaporan (Kab./Kota)	Jumlah laporan semesteran fasilitas dan koordinasi menghadiri undangan Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi dan Instansi terkait	514	Laporan	12.850.000.000	17.805.954.000	4.955.954.000		laporan semester
Pencegahan, Parmas, dan Humas		303	Evaluasi pelaksanaan pengawasan (Kab./Kota)	Jumlah laporan evaluasi pelaksanaan pengawasan	514	Laporan	5.140.000.000	3.840.273.000	-1.299.727.000		
Pencegahan, Parmas, dan Humas		304	Pemutakhiran data pemilih tetap berkelanjutan (Kab./Kota)	Jumlah kegiatan pemutakhiran data pemilih tetap berkelanjutan	514	Laporan	5.140.000.000	3.924.868.000	-1.215.132.000		- IDI variabel Hak Memilih & Dipilih (Indikator Nomor 11); - laporan triwulan
Pencegahan, Parmas, dan Humas		305	Fasilitas penguatan pemahaman kepemiluan kepada disabilitas (Kab./Kota)	Jumlah fasilitas penguatan pemahaman kepemiluan kepada disabilitas	514	Laporan	5.140.000.000	6.664.407.000	1.524.407.000		- IDI variabel Hak Memilih & Dipilih (Indikator Nomor 12) -1 laporan@514 KK
	6661		PERENCANAAN, PROGRAM DAN ANGGARAN SERTA PENYUSUNAN PERATURAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMILU				1.875.155.293.000	1.967.127.425.000	91.972.132.000		
	6661.PAH		Peraturan Lainnya		54	Peraturan, Rancangan Peraturan, Surat Keputusan	11.500.000.000	11.500.000.000	0		
			<b>Indikator KRO :</b>								
		01	Jumlah penyusunan produk hukum dukungan tahapan pemilu yang sesuai dengan ketentuan		54	Peraturan, Rancangan Peraturan, Surat Keputusan					
	6661.PAH.001		Peraturan pengawasan penyelenggaraan pemilu		54	Peraturan, Rancangan Peraturan, Surat Keputusan	11.500.000.000	11.500.000.000	0		
			<b>Komponen Input :</b>								
SDM, Organisasi, dan Diklat		101	Penyusunan pedoman pengelolaan keuangan	Jumlah dokumen pedoman pengelolaan keuangan dan BMN	7	Peraturan	750.000.000	750.000.000	0		

Hukum dan Penyelesaian Sengketa		102	Fasilitasi penyusunan peraturan Bawaslu dan produk hukum non peraturan Bawaslu	Jumlah dokumen peraturan Bawaslu dan produk hukum non peraturan Bawaslu	24	Peraturan	5.000.000.000	5.000.000.000	0
Pengawasan		103	Penyusunan peraturan pengawasan penyelenggaraan pemilu	Jumlah dokumen peraturan pengawasan penyelenggaraan pemilu	14	Peraturan	2.000.000.000	2.000.000.000	0
Penanganan Pelanggaran dan Datin		104	Penyusunan peraturan penanganan pelanggaran penyelenggaraan pemilu	Jumlah dokumen peraturan penanganan pelanggaran penyelenggaraan pemilu	4	Peraturan	1.000.000.000	1.000.000.000	0
Hukum dan Penyelesaian Sengketa		105	Penyusunan peraturan penyelesaian sengketa proses pemilu	Jumlah dokumen peraturan penyelesaian sengketa proses pemilu	4	Peraturan	1.000.000.000	1.000.000.000	0
SDM, Organisasi, dan Diklat		106	Pedoman/juknis rekrutmen aparatur pengawas	Jumlah dokumen Pedoman/juknis rekrutmen aparatur pengawas	1	Peraturan	750.000.000	750.000.000	0
Pengawasan/ Pencegahan/Parmas		107	Penyusunan peraturan pencegahan dan partisipasi masyarakat	Jumlah dokumen peraturan pencegahan dan partisipasi masyarakat		Peraturan	1.000.000.000	1.000.000.000	0
	6661.QIC		<b>Pengawasan dan Pengendalian Lembaga</b>		110.075	Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur	1.840.535.293.000	1.916.576.796.000	76.041.503.000
			<b>Indikator KRO :</b>						
		01	Jumlah unit kerja yang menyelenggarakan dukungan fasilitasi perencanaan, program dan anggaran tahapan pengawasan pemilu		549	Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur			
		02	Jumlah kementerian/lembaga yang berpartisipasi menjaga Netralitas ASN pada pelaksanaan Pemilu		20	Kementerian/ Lembaga			
	6661.QIC.001		<b>Fasilitasi dan Pembinaan Perencanaan, Program dan Anggaran Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu</b>		26.548	Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur	1.565.535.293.000	1.647.444.297.000	81.909.004.000
			<b>Komponen Input :</b>						
SDM, Organisasi, dan Diklat		101	Perencanaan program dan anggaran pengawasan penyelenggaraan pemilu	Jumlah dokumen perencanaan program dan anggaran pengawasan penyelenggaraan pemilu	1	Dokumen	1.000.000.000	1.000.000.000	0
SDM, Organisasi, dan Diklat		102	Fasilitasi dan koordinasi kegiatan strategis Bawaslu dalam mendukung pengawasan penyelenggaraan pemilu	Jumlah laporan fasilitasi dan koordinasi kegiatan strategis Bawaslu dalam mendukung pengawasan penyelenggaraan pemilu	1	Laporan	2.500.000.000	2.500.000.000	0
SDM, Organisasi, dan Diklat		103	Pengendalian keuangan dan kinerja (SPIP)	Jumlah laporan pengendalian keuangan dan kinerja (SPIP)	1	Laporan	3.000.000.000	3.000.000.000	0
Hukum dan Penyelesaian Sengketa		104	Sosialisasi dan implementasi peraturan Bawaslu dan produk hukum non peraturan Bawaslu	Jumlah laporan sosialisasi dan implementasi peraturan Bawaslu dan produk hukum non peraturan Bawaslu	2	Laporan	4.000.000.000	4.000.000.000	0
Hukum dan Penyelesaian Sengketa		105	Fasilitasi kehumasan dalam pengawasan penyelenggaraan pemilu	Jumlah laporan fasilitasi kehumasan dalam pengawasan penyelenggaraan pemilu	4	Laporan	1.150.000.000	1.150.000.000	0
Pengawasan		106	Sosialisasi pengawasan penyelenggaraan pemilu	Jumlah laporan sosialisasi pengawasan penyelenggaraan pemilu	50	Laporan	10.000.000.000	10.000.000.000	0
Pencegahan, Parmas, dan Humas		107	Pengawasan pemilu partisipatif	Jumlah laporan pengawasan pemilu partisipatif	34	Daerah	5.300.000.000	5.300.000.000	0
Pengawasan		108	Pengawasan perencanaan dan penetapan jadwal tahapan pemilu	Jumlah laporan pengawasan pemilu partisipatif	2	Laporan	1.500.000.000	1.500.000.000	0
Pencegahan, Parmas, dan Humas		109	Penguatan hubungan antar lembaga	Jumlah laporan kegiatan penguatan hubungan antar lembaga (Nota Kesepahaman, Perjanjian Kerjasama)	6	Kesepakatan	2.000.000.000	2.000.000.000	0
Penanganan Pelanggaran dan Datin		110	Fasilitasi dan pembinaan penanganan pelanggaran pemilu	Jumlah kegiatan fasilitasi pembinaan penanganan pelanggaran pemilu	4	Laporan	7.000.000.000	7.000.000.000	0
Hukum dan Penyelesaian Sengketa		111	Fasilitasi dan pembinaan penyelenggaraan penyelesaian sengketa proses pemilu	Jumlah kegiatan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan penyelesaian sengketa proses pemilu	4	Laporan	5.500.000.000	5.500.000.000	0
Ketua dan Seluruh Divisi		112	Fasilitasi koordinasi kegiatan pimpinan dalam mendukung pengawasan penyelenggaraan pemilu	Jumlah laporan fasilitasi koordinasi kegiatan pimpinan dalam mendukung pengawasan penyelenggaraan pemilu	4	Laporan	5.867.493.000	5.867.493.000	0
Pencegahan, Parmas, dan Humas		113	Penyusunan indeks kerawanan pemilu	Jumlah dokumen indeks kerawanan pemilu	1	Buku	5.000.000.000	5.000.000.000	0
Ketua		114	Pengembangan kebijakan strategis kepemiluan dan demokrasi	Jumlah dokumen pengembangan kebijakan strategis kepemiluan dan demokrasi	20	Dokumen	5.000.000.000	5.000.000.000	0
SDM, Organisasi, dan Diklat		115	Pendidikan dan pelatihan pengawasan penyelenggaraan pemilu	Jumlah orang yang mengikuti pendidikan dan pelatihan pengawasan penyelenggaraan pemilu	500	Orang	7.320.000.000	7.320.000.000	0
SDM, Organisasi, dan Diklat		116	Fasilitasi dan pembinaan pengelolaan keuangan pengawasan penyelenggaraan pemilu	Jumlah kegiatan fasilitasi pembinaan pengelolaan keuangan pengawasan penyelenggaraan pemilu	4	Laporan	3.000.000.000	3.000.000.000	0
Pencegahan, Parmas, dan Humas		117	Fasilitasi dan pembinaan pencegahan pelanggaran dan sengketa proses pemilu			Laporan	2.000.000.000	2.000.000.000	0
Ketua		118	Fasilitasi pembinaan dan penguatan kelembagaan Bawaslu			Laporan	15.000.000.000	15.000.000.000	0

SDM, Organisasi, dan Diklat	201	Perencanaan program dan anggaran pengawasan penyelenggaraan pemilu (Provinsi)	Jumlah dokumen perencanaan program dan anggaran pengawasan penyelenggaraan pemilu	34	Dokumen	8.500.000.000	10.888.654.000	2.388.654.000	
Hukum dan Penyelesaian Sengketa	202	Sosialisasi dan implementasi peraturan Bawaslu dan produk hukum non peraturan Bawaslu (Provinsi)	Jumlah laporan sosialisasi dan implementasi peraturan Bawaslu dan produk hukum non peraturan Bawaslu	68	Laporan	10.200.000.000	7.199.360.000	-3.000.640.000	
SDM, Organisasi, dan Diklat	203	Fasilitasi dan pembinaan aparatur pengawas pemilu (Provinsi)	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan aparatur pengawas pemilu	136	Laporan	10.200.000.000	18.302.005.000	8.102.005.000	
Pencegahan, Parmas, dan Humas	204	Sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif (Provinsi)	Jumlah laporan sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif	68	Laporan	10.200.000.000	10.673.931.000	473.931.000	
Penanganan Pelanggaran dan Datin	205	Fasilitasi dan pembinaan penanganan pelanggaran (Provinsi)	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan penanganan pelanggaran	136	Laporan	17.000.000.000	28.896.299.000	11.896.299.000	
Hukum dan Penyelesaian Sengketa	206	Fasilitasi dan pembinaan penyelesaian sengketa (Provinsi)	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan penyelesaian sengketa	136	Laporan	17.000.000.000	9.486.166.000	-7.513.834.000	
Ketua dan Seluruh Divisi	207	Fasilitasi, koordinasi, dan pelaporan (Provinsi)	Jumlah laporan perjalanan dinas dalam rangka menghadiri undangan	136	Laporan	11.900.000.000	39.434.667.000	27.534.667.000	
Ketua Provinsi	208	Fasilitasi pembinaan dan penguatan kelembagaan Bawaslu (Provinsi)			Laporan	25.500.000.000	10.900.375.000	-14.599.625.000	
SDM, Organisasi, dan Diklat	301	Perencanaan program dan anggaran pengawasan penyelenggaraan pemilu (Kab./Kota)	Jumlah dokumen perencanaan program dan anggaran pengawasan penyelenggaraan pemilu	514	Laporan	51.400.000.000	38.970.462.000	-12.429.538.000	
Hukum dan Penyelesaian Sengketa	302	Sosialisasi dan implementasi peraturan dan non peraturan Bawaslu (Kab./Kota)	Jumlah laporan sosialisasi dan implementasi peraturan Bawaslu dan produk hukum non peraturan Bawaslu	1.028	Laporan	51.400.000.000	53.972.523.000	2.572.523.000	
SDM, Organisasi, dan Diklat	303	Fasilitasi dan pembinaan aparatur pengawas pemilu (Kab./Kota)	Fasilitasi dan pembinaan aparatur pengawas pemilu	2.056	Laporan	77.100.000.000	120.337.394.000	43.237.394.000	
Pencegahan, Parmas, dan Humas	304	Sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif (Kab./Kota)	Jumlah laporan sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif	1.028	Laporan	77.100.000.000	85.519.681.000	8.419.681.000	
Penanganan Pelanggaran dan Datin	305	Fasilitasi dan pembinaan penanganan pelanggaran (Kab./Kota)	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan penanganan pelanggaran	2.056	Laporan	51.400.000.000	226.050.523.000	174.650.523.000	
Hukum dan Penyelesaian Sengketa	306	Fasilitasi dan pembinaan penyelesaian sengketa (Kab./Kota)	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan penyelesaian sengketa	2.056	Laporan	51.400.000.000	48.467.000.000	-2.933.000.000	
Ketua dan Seluruh Divisi Kab/Kota	307	Fasilitasi, koordinasi, dan pelaporan (Kab./Kota)	Jumlah laporan perjalanan dinas dalam rangka menghadiri undangan	2.056	Laporan	102.800.000.000	290.942.516.000	188.142.516.000	
Ketua Kab/Kota	308	Fasilitasi pembinaan dan penguatan kelembagaan Bawaslu (Kab./Kota)			Laporan	154.200.000.000	59.380.352.000	-94.819.648.000	
SDM, Organisasi, dan Diklat	401	Fasilitasi dan pembinaan aparatur pengawas pemilu (Kecamatan)	Fasilitasi dan pembinaan aparatur pengawas pemilu	7.201	Laporan	437.414.100.000	113.276.130.000	-324.137.970.000	
Ketua dan Seluruh Divisi	402	Fasilitasi, koordinasi, dan pelaporan (Kecamatan)	Jumlah laporan perjalanan dinas dalam rangka menghadiri undangan	7.201	Laporan	314.683.700.000	388.608.766.000	73.925.066.000	
	6661.QIC.002	Pengawasan Netralitas ASN		20	Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur	5.000.000.000	5.000.000.000	0	
		Komponen Input :							
Penanganan Pelanggaran dan Datin	101	Penanganan pelanggaran netralitas ASN				1.500.000.000	1.500.000.000	0	
Pengawasan	102	Penguatan pengawasan netralitas ASN	Jumlah kementerian/lembaga yang berpartisipasi menjaga netralitas ASN pada pelaksanaan pemilu	20	K/L	3.500.000.000	3.500.000.000	0	
	6661.QIC.003	Seleksi Anggota Badan Pengawas Pemilu dan Pengawas Pemilu Ad-Hoc		83.507	Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur	270.000.000.000	264.132.499.000	-5.867.501.000	
		Komponen Input :							
SDM, Organisasi, dan Diklat	101	Rekrutmen Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pelaksanaan rekrutmen Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	26	Laporan	70.000.000.000	70.000.000.000	0	
SDM, Organisasi, dan Diklat	102	Pembentukan pengawas pemilu luar negeri	Jumlah laporan pelaksanaan pembentukan pengawas pemilu luar negeri	45	Laporan	24.000.000.000	24.000.000.000	0	
SDM, Organisasi, dan Diklat	301	Rekrutmen panwaslu kecamatan (Kab./Kota)	Jumlah daerah yang melaksanakan rekrutmen pengawas pemilu	0	Daerah	0	0	0	
SDM, Organisasi, dan Diklat	401	Rekrutmen panwaslu desa/kelurahan (Kecamatan)	Jumlah daerah yang melaksanakan rekrutmen pengawas pemilu	83.436	Daerah	176.000.000.000	170.132.499.000	-5.867.501.000	
SDM, Organisasi, dan Diklat	402	Rekrutmen Pengawas TPS (Kecamatan)	Jumlah daerah yang melaksanakan rekrutmen pengawas pemilu	0	Daerah	0	0	0	
	6661.UAB	Sistem Informasi Pemerintahan		556	Sistem Informasi, Modul Aplikasi, Layanan	23.120.000.000	39.050.629.000	15.930.629.000	
		Indikator KRO :							
	01	Persentase Layanan pengembangan Sistem Informasi bawaslu yang terintegrasi		100	%				

	6661.UAB.001	Pengembangan Sistem Informasi Bawaslu		556	Sistem Informasi, Modul Aplikasi, Layanan	23.120.000.000	39.050.629.000	15.930.629.000	
		<b>Komponen Input :</b>							
Pencegahan, Parmas, dan Humas		101 Rancang bangun sistem pengawasan	Jumlah laporan rancang bangun sistem pengawasan	1	Laporan	250.000.000	250.000.000	0	
Penanganan Pelanggaran dan Datin		102 Rancang bangun sistem penanganan pelanggaran	Jumlah laporan rancang bangun sistem penanganan pelanggaran	1	Laporan	250.000.000	250.000.000	0	
Hukum dan Penyelesaian Sengketa		103 Rancang bangun sistem penyelesaian sengketa proses	Jumlah laporan rancang bangun sistem penyelesaian sengketa proses	1	Laporan	250.000.000	250.000.000	0	
SDM, Organisasi, dan Diklat		104 Rancang bangun basis data aparatur pengawas	Jumlah laporan rancang bangun basis data aparatur pengawas	1	Laporan	250.000.000	250.000.000	0	
Penanganan Pelanggaran dan Datin		105 Pengembangan Sistem Informasi	Jumlah laporan pengembangan teknologi informasi	2	Sistem Informasi	4.000.000.000	4.000.000.000	0	
Penanganan Pelanggaran dan Datin		106 Pengadaan perangkat pengolahan data dan komunikasi	Jumlah laporan pengembangan teknologi informasi	2	Unit	1.000.000.000	1.000.000.000	0	
SDM, Organisasi, dan Diklat		201 Pengadaan sarpras pendukung sistem informasi (Provinsi)		34	Unit	1.700.000.000	3.998.320.000	2.298.320.000	
SDM, Organisasi, dan Diklat		301 Pengadaan sarpras pendukung sistem informasi (Kab./Kota)		514	Unit	15.420.000.000	29.052.309.000	13.632.309.000	
	6662	PENGAWASAN PENDAFTARAN DAN VERIFIKASI PESERTA PEMILU				36.100.000.000	38.814.368.000	2.714.368.000	
	6662.QCE	Penanganan Perkara		2.195	Perkara, Berkas Perkara	2.600.000.000	2.600.000.000	0	
		<b>Indikator KRO :</b>							
		01 Jumlah Perkara yang ditangani dan diselesaikan sesuai dengan ketentuan		549	Perkara, Berkas Perkara				
	6662.QCE.001	Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu		2.195	Perkara, Berkas Perkara	2.600.000.000	2.600.000.000	0	
		<b>Komponen Input :</b>							
Penanganan Pelanggaran dan Datin		101 Pengelolaan data penanganan pelanggaran pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu	Jumlah dokumen yang dilakukan pengelolaan	0	Berkas Perkara	250.000.000	250.000.000	0	
Penanganan Pelanggaran dan Datin		102 Penyelenggaraan penanganan pelanggaran pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu	Jumlah dokumen penanganan pelanggaran Pemilu yang diproses	1	Perkara	500.000.000	500.000.000	0	
Penanganan Pelanggaran dan Datin		103 Pengelolaan barang dugaan pelanggaran pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu	Jumlah laporan kegiatan pengelolaan dugaan pelanggaran	1	Laporan	350.000.000	350.000.000	0	
Hukum dan Penyelesaian Sengketa		104 Pelaksanaan penyelesaian sengketa proses pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu	Jumlah laporan evaluasi pelaksanaan penyelesaian sengketa proses	1	Perkara	1.500.000.000	1.500.000.000	0	
Penanganan Pelanggaran dan Datin		201 Pengelolaan data penanganan pelanggaran pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu (Provinsi)	Jumlah dokumen yang dilakukan pengelolaan	34	Berkas Perkara	0	0	0	
Penanganan Pelanggaran dan Datin		202 Penyelenggaraan penanganan pelanggaran pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu (Provinsi)	Jumlah laporan kegiatan penanganan pelanggaran	34	Perkara	0	0	0	
Penanganan Pelanggaran dan Datin		203 Pengelolaan barang dugaan pelanggaran pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu (Provinsi)	Jumlah laporan kegiatan pengelolaan dugaan pelanggaran	34	Laporan	0	0	0	
Hukum dan Penyelesaian Sengketa		204 Pelaksanaan penyelesaian sengketa proses pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu (Provinsi)	Jumlah laporan evaluasi pelaksanaan penyelesaian sengketa proses	34	Perkara	0	0	0	
Penanganan Pelanggaran dan Datin		301 Pengelolaan data penanganan pelanggaran pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu (Kab.Kota)	Jumlah dokumen yang dilakukan pengelolaan	514	Berkas Perkara	0	0	0	
Penanganan Pelanggaran dan Datin		302 Penyelenggaraan penanganan pelanggaran pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu (Kab.Kota)	Jumlah laporan kegiatan penanganan pelanggaran	514	Perkara	0	0	0	
Penanganan Pelanggaran dan Datin		303 Pengelolaan barang dugaan pelanggaran pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu (Kab.Kota)	Jumlah laporan kegiatan pengelolaan dugaan pelanggaran	514	Laporan	0	0	0	
Hukum dan Penyelesaian Sengketa		304 Pelaksanaan penyelesaian sengketa proses pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu (Kab.Kota)	Jumlah laporan evaluasi pelaksanaan penyelesaian sengketa proses	514	Perkara	0	0	0	
	6662.QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga		1.648	Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur	33.500.000.000	36.214.368.000	2.714.368.000	
		<b>Indikator KRO :</b>							
		01 Jumlah unit kerja yang menyelenggarakan dukungan tahapan pengawasan pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu		549	Daerah				
	6662.QIC.001	Pengawasan Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu		1.648	Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur	33.500.000.000	36.214.368.000	2.714.368.000	
		<b>Komponen Input :</b>							
Pencegahan, Parmas, dan Humas		101 Publikasi dan dokumentasi pengawasan pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu	Jumlah laporan publikasi dan dokumentasi	1	Berita	500.000.000	500.000.000	0	
Pengawasan		102 Pengawasan pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu	Jumlah laporan pengawasan tahapan pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu	1	Laporan	200.000.000	200.000.000	0	
Penanganan Pelanggaran dan Datin		103 Fasilitas sentra gakkumdu tahapan pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu	Jumlah dokumen penanganan pelanggaran Pemilu yang diproses	1	Laporan	1.000.000.000	1.000.000.000	0	
Pencegahan, Parmas, dan Humas		104 Pencegahan dan partisipasi masyarakat tahapan pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu	Jumlah laporan pencegahan dan partisipasi masyarakat tahapan pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu	1	Laporan	1.000.000.000	1.000.000.000	0	

Pencegahan, Parmas, dan Humas		201	Publikasi dan dokumentasi pengawasan pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu (Provinsi)	Jumlah laporan Publikasi dan dokumentasi	34	Berita	0	0	0	0
Pencegahan, Parmas, dan Humas		202	Pengawasan pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu (Provinsi)	Jumlah laporan pengawasan tahapan pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu	34	Laporan	0	0	0	0
Penanganan Pelanggaran dan Datin		203	Fasilitasi sentra gakkumdu tahapan pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu (Provinsi)	Jumlah dokumen penanganan pelanggaran Pemilu yang diproses	34	Laporan	5.100.000.000	4.115.775.000	-984.225.000	
Pencegahan, Parmas, dan Humas		301	Publikasi dan dokumentasi pengawasan pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu (Kab./Kota)	Jumlah laporan Publikasi dan dokumentasi	514	Berita	0	0	0	0
Pencegahan, Parmas, dan Humas		302	Pengawasan pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu (Kab./Kota)	Jumlah laporan pengawasan tahapan pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu	514	Laporan	0	0	0	0
Penanganan Pelanggaran dan Datin		303	Fasilitasi sentra gakkumdu tahapan pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu (Kab./Kota)	Jumlah laporan fasilitasi sentra gakkumdu	514	Laporan	25.700.000.000	29.398.593.000	3.698.593.000	
	6838	PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMILU OLEH LEMBAGA AD-HOC					2.222.801.707.000	2.507.548.476.000	284.746.769.000	
	6838.QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga			196.794	Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur	2.222.801.707.000	2.507.548.476.000	284.746.769.000	
		Indikator KRO :								
		01	Persentase pembayaran honorarium dan operasional dukungan tahapan pengawasan pemilu oleh lembaga ad-hoc		100	%				
	6838.QIC.001	Honorarium Pengawas Ad-Hoc			90.682	Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur	1.213.224.360.000	1.483.405.810.000	270.181.450.000	
		Komponen Input :								
SDM, Organisasi, dan Diklat		401	Honorarium (Kecamatan)		7.201	Daerah	598.835.160.000	744.885.650.000	146.050.490.000	
SDM, Organisasi, dan Diklat		501	Honorarium (Kelurahan/Desa)		83.436	Orang	600.739.200.000	724.870.160.000	124.130.960.000	
SDM, Organisasi, dan Diklat		601	Honorarium (TPS)		0	Orang	0	0	0	
SDM, Organisasi, dan Diklat		701	Honorarium (Luar Negeri)		45	Perwakilan	13.650.000.000	13.650.000.000	0	
Luar Negeri		801	Honorarium (TPS Luar Negeri dan Kotak Suara Keliling)		0	Orang	0	0	0	
	6838.QIC.002	Operasional Pengawas Ad-Hoc			106.112	Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur	1.009.577.347.000	1.024.142.666.000	14.565.319.000	
		Komponen Input :								
SDM, Organisasi, dan Diklat		301	Sewa kendaraan operasional (Kab./Kota)		514	Lembaga	257.845.027.000	295.279.410.000	37.434.383.000	
SDM, Organisasi, dan Diklat		302	Sewa gedung/ peralatan/ meubelair (Kab./Kota)		514	Lembaga	52.428.000.000	59.511.284.000	7.083.284.000	
SDM, Organisasi, dan Diklat		402	Sewa gedung/ peralatan/ meubelair (Kecamatan)		7.201	Daerah	397.494.000.000	381.506.080.000	-15.987.920.000	
SDM, Organisasi, dan Diklat		403	Pemeliharaan gedung/ meubelair/ peralatan (Kecamatan)		7.201	Daerah	81.222.000.000	27.543.769.000	-53.678.231.000	
SDM, Organisasi, dan Diklat		404	Pelayanan operasional perkantoran (Kecamatan)		7.201	Daerah	195.291.120.000	233.115.507.000	37.824.387.000	
SDM, Organisasi, dan Diklat		405	Santunan Kecelakaan Kerja (Kecamatan)		0	Orang	0	0	0	
SDM, Organisasi, dan Diklat		502	Penanda identitas (Kelurahan/Desa)		83.436	Orang	16.687.200.000	18.576.616.000	1.889.416.000	
SDM, Organisasi, dan Diklat		602	Penanda identitas (TPS)		0	Orang	0	0	0	
SDM, Organisasi, dan Diklat		702	Dukungan operasional (Luar Negeri)		45	Perwakilan	8.610.000.000	8.610.000.000	0	
Luar Negeri		802	Penanda identitas (TPS Luar Negeri dan Kotak Suara Keliling)		0	Orang	0	0	0	
	6839	PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH					755.058.000.000	440.602.306.000	-314.455.694.000	
	6839.QCE	Penanganan Perkara			594	Perkara, Berkas Perkara	29.300.000.000	33.360.120.000	4.060.120.000	
		Indikator KRO :								
		01	Jumlah Perkara yang ditangani dan diselesaikan sesuai dengan ketentuan		594	Perkara, Berkas Perkara				
	6839.QCE.001	Penanganan Pelanggaran Pemutakhiran Data Pemilih Dan Penyusunan Daftar Pemilih			594	Perkara, Berkas Perkara	29.300.000.000	33.360.120.000	4.060.120.000	
		Komponen Input :								
Penanganan Pelanggaran dan Datin		101	Pengelolaan data penanganan pelanggaran pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih	Jumlah dokumen yang dilakukan pengelolaan	0	Berkas Perkara	0	0	0	
Penanganan Pelanggaran dan Datin		102	Penyelenggaraan penanganan pelanggaran pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih	Jumlah laporan kegiatan penanganan pelanggaran	1	Perkara	200.000.000	200.000.000	0	
Penanganan Pelanggaran dan Datin		201	Pengelolaan data penanganan pelanggaran pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih (Provinsi)	Jumlah dokumen yang dilakukan pengelolaan	0	Berkas Perkara	0	0	0	
Penanganan Pelanggaran dan Datin		202	Penyelenggaraan penanganan pelanggaran pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih (Provinsi)	Jumlah laporan kegiatan penanganan pelanggaran	34	Perkara	3.400.000.000	3.365.981.000	-34.019.000	
Penanganan Pelanggaran dan Datin		301	Pengelolaan data penanganan pelanggaran pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih (Kab./Kota)	Jumlah dokumen yang dilakukan pengelolaan	0	Berkas Perkara	0	0	0	

Penanganan Pelanggaran dan Datin		302	Penyelenggaraan penanganan pelanggaran pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih (Kab./Kota)	Jumlah laporan kegiatan penanganan pelanggaran	514	Perkara	25.700.000.000	29.794.139.000	4.094.139.000	
Penanganan Pelanggaran dan Datin		702	Penanganan pelanggaran pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih (Luar Negeri)	Jumlah laporan penanganan pelanggaran tahapan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih	45	Perwakilan	0	0	0	
	6839.QIC		Pengawasan dan Pengendalian Lembaga		92.330	Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur	725.758.000.000	407.242.186.000	-318.515.814.000	
			Indikator KRO :							
		01	Jumlah unit kerja yang menyelenggarakan dukungan tahapan pengawasan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih		549	Daerah				
	6839.QIC.001		Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Dan Penyusunan Daftar Pemilih		92.330	Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur	725.758.000.000	407.242.186.000	-318.515.814.000	
			Komponen Input :							
Pencegahan, Parmas, dan Humas		101	Publikasi dan dokumentasi pengawasan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih	Jumlah laporan publikasi dan dokumentasi	1	Laporan	100.000.000	100.000.000	0	
Pengawasan		102	Pengawasan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih	Jumlah laporan pengawasan tahapan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih	1	Laporan	1.000.000.000	1.000.000.000	0	
Penanganan Pelanggaran dan Datin		103	Fasilitasi sentra gakkumdu tahapan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih	Jumlah dokumen penanganan pelanggaran Pemilu yang diproses	1	Laporan	300.000.000	300.000.000	0	
Pencegahan, Parmas, dan Humas		104	Pencegahan dan partisipasi masyarakat tahapan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih	Jumlah laporan pencegahan dan partisipasi masyarakat tahapan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih	1	Laporan	1.000.000.000	1.000.000.000	0	
Pencegahan, Parmas, dan Humas		201	Publikasi dan dokumentasi pengawasan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih (Provinsi)	Jumlah laporan publikasi dan dokumentasi	34	Laporan	1.700.000.000	4.155.913.000	2.455.913.000	
Pencegahan, Parmas, dan Humas		202	Pengawasan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih (Provinsi)	Jumlah laporan pengawasan tahapan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih	34	Laporan	5.100.000.000	9.391.258.000	4.291.258.000	
Penanganan Pelanggaran dan Datin		203	Fasilitasi sentra gakkumdu tahapan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih (Provinsi)	Jumlah dokumen penanganan pelanggaran Pemilu yang diproses	34	Laporan	3.400.000.000	5.314.867.000	1.914.867.000	
Pencegahan, Parmas, dan Humas		301	Publikasi dan dokumentasi pengawasan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih (Kab./Kota)	Jumlah laporan publikasi dan dokumentasi	514	Laporan	12.850.000.000	22.104.058.000	9.254.058.000	
Pencegahan, Parmas, dan Humas		302	Pengawasan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih (Kab./Kota)	Jumlah laporan pengawasan tahapan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih	514	Laporan	51.400.000.000	59.488.420.000	8.088.420.000	
Penanganan Pelanggaran dan Datin		303	Fasilitasi sentra gakkumdu tahapan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih (Kab./Kota)	Jumlah dokumen penanganan pelanggaran Pemilu yang diproses	514	Laporan	38.550.000.000	43.439.337.000	4.889.337.000	
Pencegahan, Parmas, dan Humas		401	Pengawasan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih (Kecamatan)	Jumlah laporan pengawasan tahapan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih	7.201	Laporan	360.050.000.000	102.686.326.000	-257.363.674.000	
Kelurahan/Desa		501	Pengawasan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih (Kelurahan/Desa)	Jumlah laporan pengawasan tahapan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih	63.436	Laporan	250.308.000.000	158.262.007.000	-92.045.993.000	
Pencegahan, Parmas, dan Humas		701	Pengawasan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih (Luar Negeri)	Jumlah laporan pengawasan tahapan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih	45	Perwakilan	0	0	0	
	6840		PENGAWASAN PENETAPAN PESERTA PEMILU				140.270.000.000	137.856.797.000	-2.413.203.000	
	6840.QCE		Penanganan Perkara		1.647	Perkara, Berkas Perkara	104.100.000.000	61.765.981.000	-42.334.019.000	
			Indikator KRO :							
		01	Jumlah Perkara yang ditangani dan diselesaikan sesuai dengan ketentuan		549	Perkara, Berkas Perkara				
	6840.QCE.001		Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Penetapan Peserta Pemilu		1.647	Perkara, Berkas Perkara	104.100.000.000	61.765.981.000	-42.334.019.000	
			Komponen Input :							
Penanganan Pelanggaran dan Datin		101	Pengelolaan data penanganan pelanggaran penetapan peserta pemilu	Jumlah dokumen yang dilakukan pengelolaan	1	Berkas Perkara	50.000.000	50.000.000	0	
Penanganan Pelanggaran dan Datin		102	Penyelenggaraan penanganan pelanggaran penetapan peserta pemilu	Jumlah laporan kegiatan penanganan pelanggaran	1	Perkara	200.000.000	200.000.000	0	
Hukum dan Penyelesaian Sengketa		103	Pelaksanaan penyelesaian sengketa proses penetapan peserta pemilu	Jumlah laporan evaluasi pelaksanaan penyelesaian sengketa proses	1	Perkara	2.000.000.000	2.000.000.000	0	



Penanganan Pelanggaran dan Datin		201	Pengelolaan data penanganan pelanggaran penetapan peserta pemilu (Provinsi)	Jumlah dokumen yang dilakukan pengelolaan	34	Berkas Perkara	1.700.000.000	1.988.645.000	288.645.000
Penanganan Pelanggaran dan Datin		202	Penyelenggaraan penanganan pelanggaran penetapan peserta pemilu (Provinsi)	Jumlah laporan kegiatan penanganan pelanggaran	34	Perkara	1.700.000.000	2.452.259.000	752.259.000
Hukum dan Penyelesaian Sengketa		203	Pelaksanaan penyelesaian sengketa proses penetapan peserta pemilu (Provinsi)	Jumlah laporan evaluasi pelaksanaan penyelesaian sengketa proses	34	Perkara	8.500.000.000	2.549.251.000	-5.950.749.000
Penanganan Pelanggaran dan Datin		301	Pengelolaan data penanganan pelanggaran penetapan peserta pemilu (Kab./Kota)	Jumlah dokumen yang dilakukan pengelolaan	514	Berkas Perkara	12.850.000.000	16.699.485.000	3.849.485.000
Penanganan Pelanggaran dan Datin		302	Penyelenggaraan penanganan pelanggaran penetapan peserta pemilu (Kab./Kota)	Jumlah laporan kegiatan penanganan pelanggaran	514	Perkara	25.700.000.000	17.770.350.000	-7.929.650.000
Hukum dan Penyelesaian Sengketa		303	Pelaksanaan penyelesaian sengketa proses penetapan peserta pemilu (Kab./Kota)	Jumlah laporan evaluasi pelaksanaan penyelesaian sengketa proses	514	Perkara	51.400.000.000	18.055.991.000	-33.344.009.000
	6840.QIC		<b>Pengawasan dan Pengendalian Lembaga</b>		1.648	Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyulur	36.170.000.000	76.090.816.000	39.920.816.000
			<b>Indikator KRO :</b>						
		01	Jumlah unit kerja yang menyelenggarakan dukungan tahapan pengawasan penetapan peserta pemilu		549	Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyulur			
	6840.QIC.001		<b>Pengawasan Penetapan Peserta Pemilu</b>		1.648	Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyulur	36.170.000.000	76.090.816.000	39.920.816.000
			<b>Komponen Input :</b>						
Pencegahan, Parmas, dan Humas		101	Publikasi dan dokumentasi pengawasan penetapan peserta pemilu	Jumlah laporan publikasi dan dokumentasi	1	Laporan	50.000.000	50.000.000	0
Pengawasan		102	Pengawasan penetapan peserta pemilu	Jumlah laporan pengawasan tahapan penetapan peserta pemilu	1	Laporan	50.000.000	50.000.000	0
Pencegahan, Parmas, dan Humas		103	Pencegahan dan partisipasi masyarakat tahapan penetapan peserta pemilu	Jumlah laporan pencegahan dan partisipasi masyarakat tahapan penetapan peserta pemilu	1	Laporan	50.000.000	50.000.000	0
Penanganan Pelanggaran dan Datin		104	Fasilitasi sentra gakkumdu tahapan penetapan peserta pemilu	Jumlah dokumen penanganan pelanggaran Pemilu yang diproses	1	Laporan	250.000.000	250.000.000	0
Pencegahan, Parmas, dan Humas		201	Publikasi dan dokumentasi pengawasan penetapan peserta pemilu (Provinsi)	Jumlah laporan publikasi dan dokumentasi	34	Laporan	680.000.000	1.872.532.000	1.192.532.000
Pencegahan, Parmas, dan Humas		202	Pengawasan penetapan peserta pemilu (Provinsi)	Jumlah laporan pengawasan tahapan penetapan peserta pemilu	34	Laporan	2.550.000.000	2.598.972.000	48.972.000
Penanganan Pelanggaran dan Datin		203	Fasilitasi sentra gakkumdu tahapan penetapan peserta pemilu (Provinsi)	Jumlah laporan kegiatan fasilitasi sentra gakkumdu	34	Laporan	1.700.000.000	2.317.233.000	617.233.000
Pencegahan, Parmas, dan Humas		301	Publikasi dan dokumentasi pengawasan penetapan peserta pemilu (Kab./Kota)	Jumlah laporan publikasi dan dokumentasi	514	Laporan	2.570.000.000	12.024.992.000	9.454.992.000
Pencegahan, Parmas, dan Humas		302	Pengawasan penetapan peserta pemilu (Kab./Kota)	Jumlah laporan pengawasan tahapan penetapan peserta pemilu	514	Laporan	15.420.000.000	15.607.726.000	187.726.000
Penanganan Pelanggaran dan Datin		303	Fasilitasi sentra gakkumdu tahapan penetapan peserta pemilu (Kab./Kota)	Jumlah laporan kegiatan fasilitasi sentra gakkumdu	514	Laporan	12.850.000.000	41.269.361.000	28.419.361.000
	6841		<b>PENGAWASAN PENETAPAN JUMLAH KURSI DAN PENETAPAN DAERAH PEMILIHAN</b>				40.690.000.000	91.809.359.000	51.119.359.000
	6841.QCE		<b>Penanganan Perkara</b>		549	Perkara, Berkas, Perkara	27.550.000.000	34.912.379.000	7.362.379.000
			<b>Indikator KRO :</b>						
		01	Jumlah Perkara yang ditangani dan diselesaikan sesuai dengan ketentuan		549	Perkara, Berkas, Perkara			
	6841.QCE.001		<b>Penanganan Pelanggaran Penetapan Jumlah Kursi Dan Penetapan Daerah Pemilihan</b>		549	Perkara, Berkas, Perkara	27.550.000.000	34.912.379.000	7.362.379.000
			<b>Komponen Input :</b>						
Penanganan Pelanggaran dan Datin		101	Penyelenggaraan penanganan pelanggaran penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan	Jumlah laporan kegiatan penanganan pelanggaran	1	Perkara	150.000.000	150.000.000	0
Penanganan Pelanggaran dan Datin		201	Penyelenggaraan penanganan pelanggaran penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan (Provinsi)	Jumlah laporan kegiatan penanganan pelanggaran	34	Perkara	1.700.000.000	3.101.689.000	1.401.689.000
Penanganan Pelanggaran dan Datin		301	Penyelenggaraan penanganan pelanggaran penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan (Kab./Kota)	Jumlah laporan kegiatan penanganan pelanggaran	514	Perkara	25.700.000.000	31.660.690.000	5.960.690.000
	6841.QIC		<b>Pengawasan dan Pengendalian Lembaga</b>		1.099	Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyulur	13.140.000.000	56.896.980.000	43.756.980.000
			<b>Indikator KRO :</b>						
		01	Jumlah unit kerja yang menyelenggarakan dukungan tahapan pengawasan penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan		549	Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyulur			
	6841.QIC.001		<b>Pengawasan Penetapan Jumlah Kursi Dan Penetapan Daerah Pemilihan</b>		1.099	Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyulur	13.140.000.000	56.896.980.000	43.756.980.000
			<b>Komponen Input :</b>						

Pencegahan, Parmas, dan Humas		101	Publikasi dan dokumentasi pengawasan tahapan penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan	Jumlah laporan publikasi dan dokumentasi	1	Laporan	150.000.000	150.000.000	0
Pengawasan		102	Pengawasan tahapan penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan	Jumlah laporan pengawasan tahapan penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan	1	Laporan	250.000.000	250.000.000	0
Pencegahan, Parmas, dan Humas		103	Pencegahan dan partisipasi masyarakat tahapan penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan	Jumlah laporan pencegahan dan partisipasi masyarakat tahapan penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan	1	Laporan	250.000.000	250.000.000	0
Pencegahan, Parmas, dan Humas		201	Publikasi dan dokumentasi pengawasan penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan (Provinsi)	Jumlah laporan publikasi dan dokumentasi	34	Laporan	510.000.000	3.301.548.000	2.791.548.000
Pencegahan, Parmas, dan Humas		202	Pengawasan penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan (Provinsi)	Jumlah laporan pengawasan Penetapan Jumlah Kursi dan Penetapan Daerah Pemilihan	34	Laporan	1.700.000.000	5.480.785.000	3.780.785.000
Pencegahan, Parmas, dan Humas		301	Publikasi dan dokumentasi penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan (Kab./Kota)	Jumlah laporan publikasi dan dokumentasi	514	Laporan	2.570.000.000	18.428.627.000	15.858.627.000
Pencegahan, Parmas, dan Humas		302	Pengawasan penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan (Kab./Kota)	Jumlah laporan pengawasan Penetapan Jumlah Kursi dan Penetapan Daerah Pemilihan	514	Laporan	7.710.000.000	29.036.020.000	21.326.020.000
	6842		<b>PENGAWASAN PENCALONAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN SERTA ANGGOTA DPR, DPD, DPRD PROVINSI DAN DPRD KABUPATEN/KOTA</b>				451.745.000.000	338.061.269.000	-113.683.731.000
	6842.QCE		<b>Penanganan Perkara</b>		1.646	Perkara, Berkas Perkara	156.830.000.000	98.446.237.000	-58.383.763.000
			<i>Indikator KRO :</i>						
		01	Jumlah Perkara yang ditangani dan diselesaikan sesuai dengan ketentuan		549	Perkara, Berkas Perkara			
	6842.QCE.001		<b>Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota</b>		1.646	Perkara, Berkas Perkara	156.830.000.000	98.446.237.000	-58.383.763.000
			<i>Komponen Input :</i>						
Penanganan Pelanggaran dan Datin		101	Pengelolaan data penanganan pelanggaran pencalonan Presiden dan Wapres serta anggota DPR, DPD dan DPRD	Jumlah dokumen yang dilakukan pengelolaan	0	Berkas Perkara	250.000.000	250.000.000	0
Penanganan Pelanggaran dan Datin		102	Penyelenggaraan penanganan pelanggaran pencalonan Presiden dan Wapres serta anggota DPR, DPD dan DPRD	Jumlah laporan kegiatan penanganan pelanggaran	1	Perkara	500.000.000	500.000.000	0
Hukum dan Penyelesaian Sengketa		103	Pelaksanaan penyelesaian sengketa proses pencalonan Presiden dan Wapres serta anggota DPR, DPD dan DPRD	Jumlah laporan evaluasi pelaksanaan penyelesaian sengketa proses	1	Perkara	2.000.000.000	2.000.000.000	0
Penanganan Pelanggaran dan Datin		201	Pengelolaan data penanganan pelanggaran pencalonan Presiden dan Wapres serta anggota DPR, DPD dan DPRD (Provinsi)	Jumlah dokumen yang dilakukan pengelolaan	34	Berkas Perkara	1.700.000.000	2.966.601.000	1.266.601.000
Penanganan Pelanggaran dan Datin		202	Penyelenggaraan penanganan pelanggaran pencalonan Presiden dan Wapres serta anggota DPR, DPD dan DPRD (Provinsi)	Jumlah laporan kegiatan penanganan pelanggaran	34	Perkara	6.800.000.000	3.668.120.000	-3.131.880.000
Hukum dan Penyelesaian Sengketa		203	Pelaksanaan penyelesaian sengketa proses pencalonan Presiden dan Wapres serta anggota DPR, DPD dan DPRD (Provinsi)	Jumlah laporan evaluasi pelaksanaan penyelesaian sengketa proses	34	Perkara	6.800.000.000	4.752.277.000	-2.047.723.000
Penanganan Pelanggaran dan Datin		301	Pengelolaan data penanganan pelanggaran pencalonan Presiden dan Wapres serta anggota DPR, DPD dan DPRD (Kab./Kota)	Jumlah dokumen yang dilakukan pengelolaan	514	Berkas Perkara	25.700.000.000	21.526.370.000	-4.173.630.000
Penanganan Pelanggaran dan Datin		302	Penyelenggaraan penanganan pelanggaran pencalonan Presiden dan Wapres serta anggota DPR, DPD dan DPRD (Kab./Kota)	Jumlah laporan kegiatan penanganan pelanggaran	514	Perkara	51.400.000.000	33.339.381.000	-18.060.619.000
Hukum dan Penyelesaian Sengketa		303	Pelaksanaan penyelesaian sengketa proses pencalonan Presiden dan Wapres serta anggota DPR, DPD dan DPRD (Kab./Kota)	Jumlah laporan evaluasi pelaksanaan penyelesaian sengketa proses	514	Perkara	61.680.000.000	29.443.488.000	-32.236.512.000
	6842.QIC		<b>Pengawasan dan Pengendalian Lembaga</b>		8.849	Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur	294.915.000.000	239.615.032.000	-55.299.968.000
			<i>Indikator KRO :</i>						
		01	Jumlah unit kerja yang menyelenggarakan dukungan tahapan pengawasan pencalonan presiden dan wakil presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota		549	Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur			
	6842.QIC.001		<b>Pengawasan Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota</b>		8.849	Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur	294.915.000.000	239.615.032.000	-55.299.968.000
			<i>Komponen Input :</i>						
Pencegahan, Parmas, dan Humas		101	Publikasi dan dokumentasi pengawasan pencalonan Presiden dan Wapres serta anggota DPR, DPD dan DPRD	Jumlah laporan publikasi dan dokumentasi	1	Laporan	200.000.000	200.000.000	0

Pengawasan		102	Pengawasan pencalonan Presiden dan Wapres serta anggota DPR, DPD dan DPRD	Jumlah laporan pengawasan tahapan pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota	1	Laporan	500.000.000	500.000.000	0
Penanganan Pelanggaran dan Datin		103	Fasilitasi sentra gakkumdu tahapan pencalonan Presiden dan Wapres serta anggota DPR, DPD dan DPRD	Jumlah dokumen penanganan pelanggaran Pemilu yang diproses	1	Laporan	900.000.000	900.000.000	0
Pencegahan, Parmas, dan Humas		104	Pencegahan dan partisipasi masyarakat tahapan pencalonan Presiden dan Wapres serta anggota DPR, DPD dan DPRD	Jumlah laporan pencegahan dan partisipasi masyarakat tahapan pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota	1	Laporan	500.000.000	500.000.000	0
Pencegahan, Parmas, dan Humas		201	Publikasi dan dokumentasi pengawasan pencalonan Presiden dan Wapres serta anggota DPR, DPD dan DPRD (Provinsi)	Jumlah laporan publikasi dan dokumentasi	34	Laporan	3.400.000.000	4.395.062.000	995.062.000
Pencegahan, Parmas, dan Humas		202	Pengawasan pencalonan Presiden dan Wapres serta anggota DPR, DPD dan DPRD (Provinsi)	Jumlah laporan pengawasan tahapan pencalonan Presiden dan Wapres serta anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab./Kota	34	Laporan	17.000.000.000	7.447.894.000	-9.552.106.000
Penanganan Pelanggaran dan Datin		203	Fasilitasi sentra gakkumdu tahapan pencalonan Presiden dan Wapres serta anggota DPR, DPD dan DPRD (Provinsi)	Jumlah dokumen penanganan pelanggaran Pemilu yang diproses	34	Laporan	10.200.000.000	6.932.183.000	-3.267.817.000
Pencegahan, Parmas, dan Humas		301	Publikasi dan dokumentasi pengawasan pencalonan Presiden dan Wapres serta anggota DPR, DPD dan DPRD (Kab./Kota)	Jumlah laporan publikasi dan dokumentasi	514	Laporan	25.700.000.000	22.097.494.000	-3.602.506.000
Pencegahan, Parmas, dan Humas		302	Pengawasan pencalonan Presiden dan Wapres serta anggota DPR, DPD dan DPRD (Kab./Kota)	Jumlah laporan pengawasan tahapan pencalonan Presiden dan Wapres serta anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab./Kota	514	Laporan	77.100.000.000	41.029.394.000	-36.070.606.000
Penanganan Pelanggaran dan Datin		303	Fasilitasi sentra gakkumdu tahapan pencalonan Presiden dan Wapres serta anggota DPR, DPD dan DPRD (Kab./Kota)	Jumlah dokumen penanganan pelanggaran Pemilu yang diproses	514	Laporan	51.400.000.000	47.247.821.000	-4.152.179.000
Pencegahan, Parmas, dan Humas		401	Pengawasan pencalonan Presiden dan Wapres serta anggota DPR, DPD dan DPRD (Kecamatan)	Jumlah laporan pengawasan tahapan pencalonan Presiden dan Wapres serta anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab./Kota	7.201	Laporan	108.015.000.000	108.365.184.000	350.184.000
	6843	PENGAWASAN MASA KAMPANYE PEMILU					2.950.000.000	2.950.000.000	0
	6843.QCE	Penanganan Perkara		0	Perkara, Berkas Perkara	0	0	0	
		Indikator KRO :							
		01	Jumlah Perkara yang ditangani dan diselesaikan sesuai dengan ketentuan	549	Perkara, Berkas Perkara				
	6843.QCE.001	Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Masa Kampanye		0	Perkara, Berkas Perkara	0	0	0	
		Komponen Input :							
Penanganan Pelanggaran dan Datin		101	Pengelolaan data penanganan pelanggaran masa kampanye	Jumlah dokumen yang dilakukan pengelolaan	0	Berkas Perkara	0	0	0
Penanganan Pelanggaran dan Datin		102	Penyelenggaraan penanganan pelanggaran masa kampanye	Jumlah laporan kegiatan penanganan pelanggaran	0	Perkara	0	0	0
Penanganan Pelanggaran dan Datin		103	Pengelolaan barang dugaan pelanggaran masa kampanye	Jumlah laporan kegiatan pengelolaan dugaan pelanggaran	0	Laporan	0	0	0
Hukum dan Penyelesaian Sengketa		104	Pelaksanaan penyelesaian sengketa proses masa kampanye	Jumlah laporan evaluasi pelaksanaan penyelesaian sengketa proses	0	Perkara	0	0	0
Penanganan Pelanggaran dan Datin		201	Pengelolaan data penanganan pelanggaran masa kampanye (Provinsi)	Jumlah dokumen yang dilakukan pengelolaan	0	Berkas Perkara	0	0	0
Penanganan Pelanggaran dan Datin		202	Penyelenggaraan penanganan pelanggaran masa kampanye (Provinsi)	Jumlah laporan kegiatan penanganan pelanggaran	0	Perkara	0	0	0
Penanganan Pelanggaran dan Datin		203	Pengelolaan barang dugaan pelanggaran masa kampanye (Provinsi)	Jumlah laporan kegiatan pengelolaan dugaan pelanggaran	0	Laporan	0	0	0
Hukum dan Penyelesaian Sengketa		204	Pelaksanaan penyelesaian sengketa proses masa kampanye (Provinsi)	Jumlah laporan evaluasi pelaksanaan penyelesaian sengketa proses	0	Perkara	0	0	0
Penanganan Pelanggaran dan Datin		301	Pengelolaan data penanganan pelanggaran masa kampanye (Kab./Kota)	Jumlah dokumen yang dilakukan pengelolaan	0	Berkas Perkara	0	0	0
Penanganan Pelanggaran dan Datin		302	Penyelenggaraan penanganan pelanggaran masa kampanye (Kab./Kota)	Jumlah laporan kegiatan penanganan pelanggaran	0	Perkara	0	0	0
Penanganan Pelanggaran dan Datin		303	Pengelolaan barang dugaan pelanggaran masa kampanye (Kab./Kota)	Jumlah laporan kegiatan pengelolaan dugaan pelanggaran	0	Laporan	0	0	0
Hukum dan Penyelesaian Sengketa		304	Pelaksanaan penyelesaian sengketa proses masa kampanye (Kab./Kota)	Jumlah laporan evaluasi pelaksanaan penyelesaian sengketa proses	0	Perkara	0	0	0
	6843.QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga		4	Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur	2.950.000.000	2.950.000.000	0	
		Indikator KRO :							

		01	Jumlah unit kerja yang menyelenggarakan dukungan tahapan pengawasan masa kampanye pemilu		549	Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur				
	6843.QIC.001	Pengawasan Masa Kampanye			4	Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur	2.950.000.000	2.950.000.000	0	
		<b>Komponen Input :</b>								
Pencegahan, Parmas, dan Humas		101	Publikasi dan dokumentasi pengawasan masa kampanye	Jumlah laporan publikasi dan dokumentasi	1	Berita	200.000.000	200.000.000	0	
Pengawasan		102	Pengawasan masa kampanye	Jumlah laporan pengawasan tahapan masa kampanye	1	Laporan	1.000.000.000	1.000.000.000	0	
Penanganan Pelanggaran dan Datin		103	Fasilitasi sentra gakkumdu tahapan masa kampanye	Jumlah dokumen penanganan pelanggaran Pemilu yang diproses	1	Laporan	750.000.000	750.000.000	0	
Pencegahan, Parmas, dan Humas		104	Pencegahan dan partisipasi masyarakat tahapan masa kampanye	Jumlah laporan pencegahan dan partisipasi masyarakat tahapan masa kampanye	1	Laporan	1.000.000.000	1.000.000.000	0	
Pencegahan, Parmas, dan Humas		201	Publikasi dan dokumentasi pengawasan masa kampanye (Provinsi)	Jumlah laporan publikasi dan dokumentasi	0	Laporan	0	0	0	
Pencegahan, Parmas, dan Humas		202	Pengawasan masa kampanye (Provinsi)	Jumlah laporan pengawasan tahapan masa kampanye	0	Laporan	0	0	0	
Penanganan Pelanggaran dan Datin		203	Fasilitasi sentra gakkumdu tahapan masa kampanye (Provinsi)	Jumlah dokumen penanganan pelanggaran Pemilu yang diproses	0	Laporan	0	0	0	
Pencegahan, Parmas, dan Humas		301	Publikasi dan dokumentasi pengawasan masa kampanye (Kab./Kota)	Jumlah laporan publikasi dan dokumentasi	0	Laporan	0	0	0	
Pencegahan, Parmas, dan Humas		302	Pengawasan masa kampanye (Kab./Kota)	Jumlah laporan pengawasan tahapan masa kampanye	0	Laporan	0	0	0	
Penanganan Pelanggaran dan Datin		303	Fasilitasi sentra gakkumdu tahapan masa kampanye (Kab./Kota)	Jumlah dokumen penanganan pelanggaran Pemilu yang diproses	0	Laporan	0	0	0	
Pencegahan, Parmas, dan Humas		401	Publikasi dan dokumentasi pengawasan masa kampanye (Kecamatan)	Jumlah laporan publikasi dan dokumentasi	0	Laporan	0	0	0	
Pencegahan, Parmas, dan Humas		402	Pengawasan masa kampanye (Kecamatan)	Jumlah laporan pengawasan tahapan masa kampanye	0	Laporan	0	0	0	
Kelurahan/Desa		501	Pengawasan masa kampanye (Kelurahan/Desa)	Jumlah laporan pengawasan pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu	0	Laporan	0	0	0	
Pencegahan, Parmas, dan Humas		701	Publikasi dan dokumentasi pengawasan masa kampanye (Luar Negeri)	Jumlah laporan publikasi dan dokumentasi	0	Laporan	0	0	0	
Pencegahan, Parmas, dan Humas		702	Pengawasan masa kampanye (Luar Negeri)	Jumlah laporan pengawasan tahapan masa kampanye	0	Laporan	0	0	0	
	6845	PENGAWASAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA					680.000.000	680.000.000	0	
	6845.QCE	Penanganan Perkara			0	Perkara, Berkas Perkara	0	0	0	
		<b>Indikator KRO :</b>								
		01	Jumlah Perkara yang ditangani dan diselesaikan sesuai dengan ketentuan		549	Perkara, Berkas Perkara				
	6845.QCE.001	Penanganan Pelanggaran Pemungutan dan Penghitungan Suara			0	Perkara, Berkas Perkara	0	0	0	
		<b>Komponen Input :</b>								
Penanganan Pelanggaran dan Datin		101	Pengelolaan data penanganan pelanggaran pemungutan dan penghitungan suara	Jumlah dokumen yang dilakukan pengelolaan	0	Berkas Perkara	0	0	0	
Penanganan Pelanggaran dan Datin		102	Penyelenggaraan penanganan pelanggaran pemungutan dan penghitungan suara	Jumlah laporan kegiatan penanganan pelanggaran	0	Perkara	0	0	0	
Penanganan Pelanggaran dan Datin		103	Pengelolaan barang dugaan pelanggaran pemungutan dan penghitungan suara	Jumlah laporan kegiatan pengelolaan dugaan pelanggaran	0	Laporan	0	0	0	
Penanganan Pelanggaran dan Datin		201	Pengelolaan data penanganan pelanggaran pemungutan dan penghitungan suara (Provinsi)	Jumlah dokumen yang dilakukan pengelolaan	0	Berkas Perkara	0	0	0	
Penanganan Pelanggaran dan Datin		202	Penyelenggaraan penanganan pelanggaran pemungutan dan penghitungan suara (Provinsi)	Jumlah laporan kegiatan penanganan pelanggaran	0	Perkara	0	0	0	
Penanganan Pelanggaran dan Datin		203	Pengelolaan barang dugaan pelanggaran pemungutan dan penghitungan suara (Provinsi)	Jumlah laporan kegiatan pengelolaan dugaan pelanggaran	0	Laporan	0	0	0	
Penanganan Pelanggaran dan Datin		301	Pengelolaan data penanganan pelanggaran pemungutan dan penghitungan suara (Kab./Kota)	Jumlah dokumen yang dilakukan pengelolaan	0	Berkas Perkara	0	0	0	
Penanganan Pelanggaran dan Datin		302	Penyelenggaraan penanganan pelanggaran pemungutan dan penghitungan suara (Kab./Kota)	Jumlah laporan kegiatan penanganan pelanggaran	0	Perkara	0	0	0	
Penanganan Pelanggaran dan Datin		303	Pengelolaan barang dugaan pelanggaran pemungutan dan penghitungan suara (Kab./Kota)	Jumlah laporan kegiatan pengelolaan dugaan pelanggaran	0	Laporan	0	0	0	
	6845.QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga			1	Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur	680.000.000	680.000.000	0	
		<b>Indikator KRO :</b>								
		01	Jumlah unit kerja yang menyelenggarakan dukungan tahapan pengawasan pemungutan dan penghitungan suara		549	Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur				

	6845.QIC.001	Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara		1	Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur	680.000.000	680.000.000	0	
		<b>Komponen Input :</b>							
Pencegahan, Parmas, dan Humas	101	Publikasi dan dokumentasi pengawasan pemungutan dan penghitungan suara	Jumlah laporan publikasi dan dokumentasi	0	Laporan	0	0	0	
Pengawasan	102	Pengawasan pemungutan dan penghitungan suara	Jumlah laporan pengawasan tahapan pemungutan dan penghitungan suara	0	Laporan	0	0	0	
Penanganan Pelanggaran dan Datin	103	Fasilitasi sentra gakkumdu tahapan pemungutan dan penghitungan suara	Jumlah dokumen penanganan pelanggaran Pemilu yang diproses	0	Laporan	0	0	0	
SDM, Organisasi, dan Diklat	104	Fasilitasi pelatihan saksi parpol	Jumlah orang yang mengikuti ToT pelatihan saksi parpol	1	orang	680.000.000	680.000.000	0	
Pencegahan, Parmas, dan Humas	105	Pencegahan dan partisipasi masyarakat tahapan pemungutan dan penghitungan suara	Jumlah laporan pencegahan dan partisipasi masyarakat tahapan pemungutan dan penghitungan suara	0	Laporan	0	0	0	
Pencegahan, Parmas, dan Humas	201	Publikasi dan dokumentasi pengawasan pemungutan dan penghitungan suara (Provinsi)	Jumlah laporan publikasi dan dokumentasi	0	Laporan	0	0	0	
Pencegahan, Parmas, dan Humas	202	Pengawasan pemungutan dan penghitungan suara (Provinsi)	Jumlah laporan pengawasan tahapan pemungutan dan penghitungan suara	0	Laporan	0	0	0	
Penanganan Pelanggaran dan Datin	203	Fasilitasi sentra gakkumdu tahapan pengawasan pemungutan dan penghitungan suara (Provinsi)	Jumlah dokumen penanganan pelanggaran Pemilu yang diproses	0	Laporan	0	0	0	
SDM, Organisasi, dan Diklat	204	Fasilitasi pelatihan saksi parpol (Provinsi)	Jumlah orang yang mengikuti ToT pelatihan saksi parpol	0	orang	0	0	0	
Pencegahan, Parmas, dan Humas	301	Publikasi dan dokumentasi pengawasan pemungutan dan penghitungan suara (Kab./Kota)	Jumlah laporan publikasi dan dokumentasi	0	Laporan	0	0	0	
Pencegahan, Parmas, dan Humas	302	Pengawasan pemungutan dan penghitungan suara (Kab./Kota)	Jumlah laporan pengawasan tahapan pemungutan dan penghitungan suara	0	Laporan	0	0	0	
Penanganan Pelanggaran dan Datin	303	Fasilitasi sentra gakkumdu tahapan pemungutan dan penghitungan suara (Kab./Kota)	Jumlah dokumen penanganan pelanggaran Pemilu yang diproses	0	Laporan	0	0	0	
SDM, Organisasi, dan Diklat	304	Fasilitasi pelatihan saksi parpol (Kab./Kota)	Jumlah orang yang mengikuti ToT pelatihan saksi parpol	0	orang	0	0	0	
Pencegahan, Parmas, dan Humas	401	Publikasi dan dokumentasi pengawasan pemungutan dan penghitungan suara (Kecamatan)	Jumlah laporan publikasi dan dokumentasi	0	Laporan	0	0	0	
Pencegahan, Parmas, dan Humas	402	Pengawasan pemungutan dan penghitungan suara (Kecamatan)	Jumlah laporan pengawasan tahapan pemungutan dan penghitungan suara	0	Laporan	0	0	0	
SDM, Organisasi, dan Diklat	403	Pelatihan saksi partai politik (Kecamatan)		0	Laporan	0	0	0	
Kelurahan/Desa	501	Pengawasan pemungutan dan penghitungan suara (Kelurahan/Desa)	Jumlah laporan pengawasan tahapan pemungutan dan penghitungan suara	0	Laporan	0	0	0	
TPS	601	Pengawasan pemungutan dan penghitungan suara (TPS)	Jumlah laporan pengawasan tahapan pemungutan dan penghitungan suara	0	Laporan	0	0	0	
Pencegahan, Parmas, dan Humas	701	Publikasi dan dokumentasi pengawasan pemungutan dan penghitungan suara (Luar Negeri)	Jumlah laporan publikasi dan dokumentasi	0	Laporan	0	0	0	
Pencegahan, Parmas, dan Humas	702	Pengawasan pemungutan dan penghitungan suara (Luar Negeri)	Jumlah laporan pengawasan tahapan pemungutan dan penghitungan suara	0	Laporan	0	0	0	
Pencegahan, Parmas, dan Humas	801	Pengawasan pemungutan dan penghitungan suara (TPS dan KSK Luar Negeri)	Jumlah laporan pengawasan tahapan pemungutan dan penghitungan suara	0	Laporan	0	0	0	
	6848	PENGAWASAN LOGISTIK				650.000.000	650.000.000	0	
	6848.QCE	Penanganan Perkara		0	Perkara, Berkas Perkara	0	0	0	
		<b>Indikator KRO :</b>							
	01	Jumlah Perkara yang ditangani dan diselesaikan sesuai dengan ketentuan		549	Perkara, Berkas Perkara				
	6848.QCE.001	Penanganan Pelanggaran Logistik		0	Perkara, Berkas Perkara	0	0	0	
		<b>Komponen Input :</b>							
Penanganan Pelanggaran dan Datin	101	Penyelenggaraan penanganan pelanggaran pengadaan dan distribusi logistik	Jumlah laporan kegiatan penanganan pelanggaran	0	Perkara	0	0	0	
Penanganan Pelanggaran dan Datin	102	Fasilitasi dan pengelolaan barang dugaan pelanggaran pengadaan dan distribusi logistik	Jumlah laporan kegiatan pengelolaan dugaan pelanggaran	0	Laporan	0	0	0	
Penanganan Pelanggaran dan Datin	201	Penyelenggaraan penanganan pelanggaran logistik (Provinsi)	Jumlah perkara pelanggaran yang ditangani	0	Perkara	0	0	0	
Penanganan Pelanggaran dan Datin	202	Fasilitasi dan pengelolaan barang dugaan pelanggaran logistik (Provinsi)	Jumlah laporan kegiatan pengelolaan dugaan pelanggaran	0	Laporan	0	0	0	
Penanganan Pelanggaran dan Datin	301	Penyelenggaraan penanganan pelanggaran logistik (Kab./Kota)	Jumlah perkara pelanggaran yang ditangani	0	Perkara	0	0	0	
Penanganan Pelanggaran dan Datin	302	Fasilitasi dan pengelolaan barang dugaan pelanggaran logistik (Kab./Kota)	Jumlah laporan kegiatan pengelolaan dugaan pelanggaran	0	Laporan	0	0	0	

	6848.QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga		4	Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur	650.000.000	650.000.000	0	
		<b>Indikator KRO :</b>							
		01 Jumlah unit kerja yang menyelenggarakan dukungan tahapan pengawasan logistik		549	Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur				
	6848.QIC.001	Pengawasan Logistik		4	Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur	650.000.000	650.000.000	0	
		<b>Komponen Input :</b>							
Pencegahan, Parmas, dan Humas		101 Publikasi dan dokumentasi pengawasan pengadaan dan distribusi logistik	Jumlah laporan publikasi dan dokumentasi	1	Berita	150.000.000	150.000.000	0	
Pengawasan		102 Pengawasan pengadaan dan distribusi logistik	Jumlah laporan pengawasan pengadaan dan distribusi logistik	1	Laporan	100.000.000	100.000.000	0	
Penanganan Pelanggaran dan Datin		103 Fasilitasi sentra gakkumdu tahapan pengadaan dan distribusi logistik	Jumlah laporan kegiatan fasilitasi sentra gakkumdu	1	Laporan	300.000.000	300.000.000	0	
Pencegahan, Parmas, dan Humas		104 Pencegahan dan partisipasi masyarakat tahapan pengadaan dan distribusi logistik	Jumlah laporan pencegahan dan partisipasi masyarakat tahapan pengadaan dan distribusi logistik	1	Laporan	100.000.000	100.000.000	0	
Pencegahan, Parmas, dan Humas		201 Publikasi dan dokumentasi pengawasan logistik (Provinsi)	Jumlah laporan publikasi dan dokumentasi	0	Laporan	0	0	0	
Pencegahan, Parmas, dan Humas		202 Pengawasan logistik (Provinsi)	Jumlah laporan pengawasan pengadaan dan distribusi logistik	0	Laporan	0	0	0	
Penanganan Pelanggaran dan Datin		203 Fasilitasi sentra gakkumdu tahapan logistik (Provinsi)	Jumlah laporan kegiatan fasilitasi sentra gakkumdu	0	Laporan	0	0	0	
Pencegahan, Parmas, dan Humas		301 Publikasi dan dokumentasi pengawasan logistik (Kab./Kota)	Jumlah laporan publikasi dan dokumentasi	0	Laporan	0	0	0	
Pencegahan, Parmas, dan Humas		302 Pengawasan logistik (Kab./Kota)	Jumlah laporan pengawasan pengadaan dan distribusi logistik	0	Laporan	0	0	0	
Penanganan Pelanggaran dan Datin		303 Fasilitasi sentra gakkumdu tahapan logistik (Kab./Kota)	Jumlah laporan kegiatan fasilitasi sentra gakkumdu	0	Laporan	0	0	0	
Pencegahan, Parmas, dan Humas		401 Publikasi dan dokumentasi pengawasan logistik (Kecamatan)	Jumlah laporan publikasi dan dokumentasi	0	Laporan	0	0	0	
Pencegahan, Parmas, dan Humas		402 Pengawasan logistik (Kecamatan)	Jumlah laporan pengawasan distribusi logistik	0	Laporan	0	0	0	
Kelurahan/Desa		501 Pengawasan logistik (Kelurahan/Desa)	Jumlah laporan pengawasan distribusi logistik	0	Laporan	0	0	0	
Luar Negeri		701 Publikasi dan dokumentasi pengawasan logistik (Luar Negeri)	Jumlah laporan publikasi dan dokumentasi	0	Laporan	0	0	0	
Luar Negeri		702 Pengawasan logistik (Luar Negeri)	Jumlah laporan pengawasan distribusi logistik	0	Laporan	0	0	0	
	xxxx	<b>PENGAWASAN MASA TENANG</b>				0	0	0	
	xxxx.QCE	Penanganan Perkara		0	Perkara, Berkas Perkara	0	0	0	
		<b>Indikator KRO :</b>							
		01 Jumlah Perkara yang ditangani dan diselesaikan sesuai dengan ketentuan		549	Perkara, Berkas Perkara				
	xxxx.QCE.001	Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Masa Tenang		0	Perkara, Berkas Perkara	0	0	0	
		<b>Komponen Input :</b>							
Penanganan Pelanggaran dan Datin		101 Pengelolaan data penanganan pelanggaran masa tenang	Jumlah dokumen yang dilakukan pengelolaan	0	Berkas Perkara	0	0	0	
Penanganan Pelanggaran dan Datin		102 Penyelenggaraan penanganan pelanggaran masa tenang	Jumlah laporan kegiatan penanganan pelanggaran	0	Perkara	0	0	0	
Penanganan Pelanggaran dan Datin		103 Pengelolaan barang dugaan pelanggaran masa tenang	Jumlah laporan kegiatan pengelolaan dugaan pelanggaran	0	Laporan	0	0	0	
Hukum dan Penyelesaian Sengketa		104 Pelaksanaan penyelesaian sengketa proses masa tenang	Jumlah laporan evaluasi pelaksanaan penyelesaian sengketa proses	0	Perkara	0	0	0	
Penanganan Pelanggaran dan Datin		201 Pengelolaan data penanganan pelanggaran masa tenang (Provinsi)	Jumlah dokumen yang dilakukan pengelolaan	0	Berkas Perkara	0	0	0	
Penanganan Pelanggaran dan Datin		202 Penyelenggaraan penanganan pelanggaran masa tenang (Provinsi)	Jumlah laporan kegiatan penanganan pelanggaran	0	Perkara	0	0	0	
Penanganan Pelanggaran dan Datin		203 Pengelolaan barang dugaan pelanggaran masa tenang (Provinsi)	Jumlah laporan kegiatan pengelolaan dugaan pelanggaran	0	Laporan	0	0	0	
Hukum dan Penyelesaian Sengketa		204 Pelaksanaan penyelesaian sengketa proses masa tenang (Provinsi)	Jumlah laporan evaluasi pelaksanaan penyelesaian sengketa proses	0	Perkara	0	0	0	
Penanganan Pelanggaran dan Datin		301 Pengelolaan data penanganan pelanggaran masa tenang (Kab./Kota)	Jumlah dokumen yang dilakukan pengelolaan	0	Berkas Perkara	0	0	0	
Penanganan Pelanggaran dan Datin		302 Penyelenggaraan penanganan pelanggaran masa tenang (Kab./Kota)	Jumlah laporan kegiatan penanganan pelanggaran	0	Perkara	0	0	0	
Penanganan Pelanggaran dan Datin		303 Pengelolaan barang dugaan pelanggaran masa tenang (Kab./Kota)	Jumlah laporan kegiatan pengelolaan dugaan pelanggaran	0	Laporan	0	0	0	

Hukum dan Penyelesaian Sengketa		304	Pelaksanaan penyelesaian sengketa proses masa tenang (Kab./Kota)	Jumlah laporan evaluasi pelaksanaan penyelesaian sengketa proses	0	Perkara	0	0	0
	xxxx.QIC		Pengawasan dan Pengendalian Lembaga		0	Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur	0	0	0
			<b>Indikator KRO :</b>						
		01	Jumlah unit kerja yang menyelenggarakan dukungan tahapan pengawasan masa tenang		549	Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur			
	xxxx.QIC.001		Pengawasan Masa Tenang		0	Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur	0	0	0
			<b>Komponen Input :</b>						
Pencegahan, Parmas, dan Humas		101	Publikasi dan dokumentasi pengawasan masa tenang	Jumlah laporan publikasi dan dokumentasi	0	Laporan	0	0	0
Pengawasan		102	Pengawasan masa tenang	Jumlah laporan pengawasan tahapan masa tenang	0	Laporan	0	0	0
Penanganan Pelanggaran dan Datin		103	Fasilitasi sentra gakkumdu tahapan masa tenang	Jumlah dokumen penanganan pelanggaran Pemilu yang diproses	0	Laporan	0	0	0
Pencegahan, Parmas, dan Humas		104	Pencegahan dan partisipasi masyarakat tahapan masa tenang	Jumlah laporan pencegahan dan partisipasi masyarakat tahapan masa tenang	0	Laporan	0	0	0
Pencegahan, Parmas, dan Humas		201	Publikasi dan dokumentasi pengawasan masa tenang (Provinsi)	Jumlah laporan publikasi dan dokumentasi	0	Laporan	0	0	0
Pencegahan, Parmas, dan Humas		202	Pengawasan masa tenang (Provinsi)	Jumlah laporan pengawasan tahapan masa tenang	0	Laporan	0	0	0
Penanganan Pelanggaran dan Datin		203	Fasilitasi sentra gakkumdu tahapan masa tenang (Provinsi)	Jumlah dokumen penanganan pelanggaran Pemilu yang diproses	0	Laporan	0	0	0
Pencegahan, Parmas, dan Humas		301	Publikasi dan dokumentasi pengawasan masa tenang (Kab./Kota)	Jumlah laporan publikasi dan dokumentasi	0	Laporan	0	0	0
Pencegahan, Parmas, dan Humas		302	Pengawasan masa tenang (Kab./Kota)	Jumlah laporan pengawasan tahapan masa tenang	0	Laporan	0	0	0
Penanganan Pelanggaran dan Datin		303	Fasilitasi sentra gakkumdu tahapan masa tenang (Kab./Kota)	Jumlah dokumen penanganan pelanggaran Pemilu yang diproses	0	Laporan	0	0	0
Pencegahan, Parmas, dan Humas		401	Publikasi dan dokumentasi pengawasan masa tenang (Kecamatan)	Jumlah laporan publikasi dan dokumentasi	0	Laporan	0	0	0
Pencegahan, Parmas, dan Humas		402	Pengawasan masa tenang (Kecamatan)	Jumlah laporan pengawasan tahapan masa tenang	0	Laporan	0	0	0
Kelurahan/Desa		501	Pengawasan masa tenang (Kelurahan/Desa)	Jumlah laporan pengawasan tahapan masa tenang	0	Laporan	0	0	0
Pencegahan, Parmas, dan Humas		701	Publikasi dan dokumentasi pengawasan masa tenang (Luar Negeri)	Jumlah laporan publikasi dan dokumentasi	0	Laporan	0	0	0
Pencegahan, Parmas, dan Humas		702	Pengawasan masa tenang (Luar Negeri)	Jumlah laporan pengawasan tahapan masa tenang	0	Laporan	0	0	0
	xxxx		<b>PENGAWASAN PENETAPAN HASIL PEMILU</b>				0	0	0
	xxxx.QCE		Penanganan Perkara		0	Perkara, Berkas Perkara	0	0	0
			<b>Indikator KRO :</b>						
		01	Jumlah Perkara yang ditangani dan diselesaikan sesuai dengan ketentuan		549	Perkara, Berkas Perkara			
	xxxx.QCE.001		Penanganan Pelanggaran Penetapan Hasil Pemilu		0	Perkara, Berkas Perkara	0	0	0
			<b>Komponen Input :</b>						
Penanganan Pelanggaran dan Datin		101	Pengelolaan data penanganan pelanggaran penetapan hasil pemilu	Jumlah dokumen yang dilakukan pengelolaan	0	Berkas Perkara	0	0	0
Penanganan Pelanggaran dan Datin		102	Penyelenggaraan penanganan pelanggaran penetapan hasil pemilu	Jumlah laporan kegiatan penanganan pelanggaran	0	Perkara	0	0	0
Penanganan Pelanggaran dan Datin		201	Pengelolaan data penanganan pelanggaran penetapan hasil pemilu (Provinsi)	Jumlah dokumen yang dilakukan pengelolaan	0	Berkas Perkara	0	0	0
Penanganan Pelanggaran dan Datin		202	Penyelenggaraan penanganan pelanggaran penetapan hasil pemilu (Provinsi)	Jumlah laporan kegiatan penanganan pelanggaran	0	Perkara	0	0	0
Penanganan Pelanggaran dan Datin		301	Pengelolaan data penanganan pelanggaran penetapan hasil pemilu (Kab./Kota)	Jumlah dokumen yang dilakukan pengelolaan	0	Berkas Perkara	0	0	0
Penanganan Pelanggaran dan Datin		302	Penyelenggaraan penanganan pelanggaran penetapan hasil pemilu (Kab./Kota)	Jumlah laporan kegiatan penanganan pelanggaran	0	Perkara	0	0	0
	xxxx.QIC		Pengawasan dan Pengendalian Lembaga		0	Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur	0	0	0
			<b>Indikator KRO :</b>						
		01	Jumlah unit kerja yang menyelenggarakan dukungan tahapan pengawasan penetapan hasil pemilu		549	Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur			

	xxxx.QIC.001	Pengawasan Penetapan Hasil Pemilu		0	Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur	0	0	0	0
		<b>Komponen Input :</b>							
Pencegahan, Parmas, dan Humas	101	Publikasi dan dokumentasi pengawasan penetapan hasil pemilu	Jumlah laporan publikasi dan dokumentasi	0	Laporan	0	0	0	0
Pengawasan	102	Pengawasan penetapan hasil pemilu	Jumlah laporan pengawasan tahapan penetapan hasil pemilu	0	Laporan	0	0	0	0
Penanganan Pelanggaran dan Datin	103	Fasilitasi sentra gakkumdu tahapan penetapan hasil pemilu	Jumlah dokumen penanganan pelanggaran Pemilu yang diproses	0	Laporan	0	0	0	0
Hukum dan Penyelesaian Sengketa	104	Fasilitasi Perselisihan Hasil Pemilihan Umum	Jumlah laporan pengawasan tahapan penetapan hasil pemilu	0	Laporan	0	0	0	0
Pencegahan, Parmas, dan Humas	105	Pencegahan dan partisipasi masyarakat tahapan penetapan hasil pemilu	Jumlah laporan pencegahan dan partisipasi masyarakat tahapan penetapan hasil pemilu	0	Laporan	0	0	0	0
Pencegahan, Parmas, dan Humas	201	Publikasi dan dokumentasi pengawasan penetapan hasil pemilu (Provinsi)	Jumlah laporan publikasi dan dokumentasi	0	Laporan	0	0	0	0
Pencegahan, Parmas, dan Humas	202	Pengawasan penetapan hasil pemilu (Provinsi)	Jumlah laporan pengawasan tahapan penetapan hasil pemilu	0	Laporan	0	0	0	0
Penanganan Pelanggaran dan Datin	203	Fasilitasi sentra gakkumdu tahapan penetapan hasil pemilu (Provinsi)	Jumlah dokumen penanganan pelanggaran Pemilu yang diproses	0	Laporan	0	0	0	0
Hukum dan Penyelesaian Sengketa	204	Fasilitasi Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (Provinsi)	Jumlah laporan pengawasan tahapan penetapan hasil pemilu	0	Laporan	0	0	0	0
Pencegahan, Parmas, dan Humas	301	Publikasi dan dokumentasi pengawasan penetapan hasil pemilu (Kab./Kota)	Jumlah laporan publikasi dan dokumentasi	0	Laporan	0	0	0	0
Pencegahan, Parmas, dan Humas	302	Pengawasan penetapan hasil pemilu (Kab./Kota)	Jumlah laporan pengawasan tahapan penetapan hasil pemilu	0	Laporan	0	0	0	0
Penanganan Pelanggaran dan Datin	303	Fasilitasi sentra gakkumdu tahapan penetapan hasil pemilu (Kab./Kota)	Jumlah dokumen penanganan pelanggaran Pemilu yang diproses	0	Laporan	0	0	0	0
Hukum dan Penyelesaian Sengketa	304	Fasilitasi Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (Kab./Kota)	Jumlah laporan pengawasan tahapan penetapan hasil pemilu	0	Laporan	0	0	0	0
Hukum dan Penyelesaian Sengketa	401	Fasilitasi Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (Kecamatan)	Jumlah laporan publikasi dan dokumentasi	0	Laporan	0	0	0	0
	xxxx	PENGAWASAN PENGUCAPAN SUMPAH/JANJI PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN SERTA ANGGOTA DPR, DPD, DPRD PROVINSI, DAN DPRD KABUPATEN/KOTA				0	0	0	0
	xxxx.QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga		0	Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur	0	0	0	0
		<b>Indikator KRO :</b>							
		01 Jumlah unit kerja yang menyelenggarakan dukungan tahapan pengawasan pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota		549	Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur				
	xxxx.QIC.001	Pengawasan Pengucapan Sumpah/Janji Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota		0	Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur	0	0	0	0
		<b>Komponen Input :</b>							
Pencegahan, Parmas, dan Humas	101	Publikasi dan dokumentasi pengawasan pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wapres serta Anggota DPR, DPD dan DPRD	Jumlah laporan publikasi dan dokumentasi	0	Laporan	0	0	0	0
Pengawasan	102	Pengawasan pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wapres serta Anggota DPR, DPD dan DPRD	Jumlah laporan pengawasan tahapan pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota	0	Laporan	0	0	0	0
Pencegahan, Parmas, dan Humas	201	Publikasi dan dokumentasi pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wapres serta Anggota DPR, DPD dan DPRD (Provinsi)	Jumlah laporan publikasi dan dokumentasi	0	Laporan	0	0	0	0
Pencegahan, Parmas, dan Humas	202	Pengawasan pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wapres serta Anggota DPR, DPD dan DPRD (Provinsi)	Jumlah laporan pengawasan tahapan pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota	0	Laporan	0	0	0	0
Pencegahan, Parmas, dan Humas	301	Publikasi dan dokumentasi pengawasan pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wapres serta Anggota DPR, DPD dan DPRD (Kab./Kota)	Jumlah laporan publikasi dan dokumentasi	0	Laporan	0	0	0	0
Pencegahan, Parmas, dan Humas	302	Pengawasan pengawasan pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wapres serta Anggota DPR, DPD dan DPRD (Kab./Kota)	Jumlah laporan pengawasan tahapan pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota	0	Laporan	0	0	0	0
	115.WA	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN				1.463.101.817.000	1.463.101.817.000	0	0



	4355	PEMERIKSAAN, PENGENDALIAN, DAN PENGAWASAN INTERNAL				41.080.000.000	34.911.871.000	-6.168.129.000	
	4355.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal		978	Dokumen, Layanan, Laporan	41.080.000.000	34.911.871.000	-6.168.129.000	
		<b>Indikator KRO :</b>							
		01 Persentase jumlah Layanan Manajemen Kinerja Internal Inspektoral Wilayah I, II, dan III yang sesuai dengan ketentuan		100	%				Jayanan audit internal
		02 Persentase jumlah Layanan Manajemen Kinerja Internal Biro Perencanaan dan Organisasi yang sesuai dengan ketentuan		100	%				Jayanan reformasi kinerja
	4355.EBD.961	Layanan Reformasi Kinerja		605	Dokumen, Layanan, Laporan	21.080.000.000	14.911.871.000	-6.168.129.000	
		<b>Komponen Input :</b>							
SDM, Organisasi, dan Diklat		101 Fasilitas penyusunan dan pembinaan SOP Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan fasilitas penyusunan dan pembinaan SOP Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Kabupaten/Kota	5	Laporan	1.000.000.000	1.000.000.000	0	SOP internal organisasi
SDM, Organisasi, dan Diklat		102 Fasilitas pelaksanaan reformasi birokrasi	Jumlah tindak lanjut rekomendasi RB, implementasi ZI	8	Dokumen	1.000.000.000	1.000.000.000	0	
SDM, Organisasi, dan Diklat		103 Fasilitas pelaporan LHKPN dan LHKASN	tingkat kepatuhan pelaporan LHKPN dan LHKASN	35	Laporan	1.000.000.000	1.000.000.000	0	34 provinsi+pusat
SDM, Organisasi, dan Diklat		104 Fasilitas dan pembinaan penyelenggaraan layanan organisasi	Jumlah laporan fasilitas dan pembinaan penyelenggaraan layanan organisasi	1	Laporan	2.500.000.000	2.500.000.000	0	
Hukum dan Penyelesaian Sengketa		105 Penyusunan Indeks Kepatuhan dalam Penyusunan Produk Hukum	Jumlah dokumen indeks Kepatuhan dalam Penyusunan Produk Hukum	1	Dokumen	500.000.000	500.000.000	0	IKU Lembaga
Hukum dan Penyelesaian Sengketa		106 Penyusunan Indeks Kepuasan Pelayanan Kehumasan	Jumlah dokumen indeks Kepuasan Pelayanan Kehumasan	1	Dokumen	200.000.000	200.000.000	0	IKU Karo Biro Hukum dan Humas
Hukum dan Penyelesaian Sengketa		107 Penyusunan Indeks Kepuasan Layanan Hukum dan Bantuan Hukum	Jumlah dokumen indeks Kepuasan Layanan Hukum dan Bantuan Hukum	1	Dokumen	200.000.000	200.000.000	0	IKU Karo Biro Hukum dan Humas
SDM, Organisasi, dan Diklat		108 Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Keuangan dan Aset	Jumlah dokumen Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Keuangan dan Aset	1	Dokumen	200.000.000	200.000.000	0	
SDM, Organisasi, dan Diklat		109 Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	1	Dokumen	200.000.000	200.000.000	0	
SDM, Organisasi, dan Diklat		110 Indeks Kepuasan Pelayanan pengadaan barang dan jasa, rumah tangga dan perlengkapan	Jumlah dokumen Indeks Kepuasan Pelayanan pengadaan barang dan jasa, rumah tangga dan perlengkapan	1	Dokumen	200.000.000	200.000.000	0	
SDM, Organisasi, dan Diklat		111 Indeks Kepuasan Pelayanan Keptokolan dan Keamanan Dalam	Jumlah dokumen Indeks Kepuasan Pelayanan Keptokolan dan Keamanan Dalam	1	Dokumen	200.000.000	200.000.000	0	
SDM, Organisasi, dan Diklat		112 Indeks Kepuasan Pelayanan pengawasan internal	Jumlah dokumen Indeks Kepuasan Pelayanan pengawasan internal	1	Dokumen	200.000.000	200.000.000	0	indeks hasil pelayanan kualitas dengan skor minimal 65 dari skala 100
SDM, Organisasi, dan Diklat		201 Implementasi reformasi birokrasi Bawaslu dan Bawaslu Provinsi	Jumlah dokumen LHKPN/LHKASN, penyusunan dan implementasi SOP, zona integritas, dan survey kepuasan layanan	34	Dokumen	3.400.000.000	2.171.574.000	-1.228.426.000	
SDM, Organisasi, dan Diklat		301 Implementasi reformasi birokrasi Bawaslu dan Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen LHKPN/LHKASN, penyusunan dan implementasi SOP, zona integritas, dan survey kepuasan layanan	514	Dokumen	10.280.000.000	5.340.297.000	-4.939.703.000	
	4355.EBD.965	Layanan Audit Internal		373	Dokumen, Layanan, Laporan	20.000.000.000	20.000.000.000	0	
		<b>Komponen Input :</b>							
SDM, Organisasi, dan Diklat		101 Audit internal	Jumlah laporan Audit internal Inspektoral wilayah I,II,III	66	Laporan	6.000.000.000	6.000.000.000	0	22 Laporan Audit Internal (masing-masing Irwil)
SDM, Organisasi, dan Diklat		102 Reviu kinerja	Jumlah laporan Reviu kinerja Inspektoral wilayah I,II,III	90	Laporan	6.500.000.000	6.500.000.000	0	Masing-masing Irwil: * - 24 Laporan Reviu Kinerja dan Keuangan - 6 Laporan Reviu atas Penyelenggaraan Pemilu untuk dana hibah
SDM, Organisasi, dan Diklat		103 Pemeriksaan, pembinaan dan pengawasan internal	Jumlah laporan Pemeriksaan, pembinaan dan pengawasan internal Inspektoral wilayah I,II,III	217	Laporan	7.500.000.000	7.500.000.000	0	-10+10+10 Pembinaan pengawasan internal -6+6+6 Kegiatan Pengawasan Lainnya -14+13+12 Tindak Lanjut Hasil LHP -3+3+3 Laporan Pengelolaan Whistleblowing System, Penanganan Pengaduan dan Benturan -1+1+1 Laporan Penanganan Gratifikasi -14+13+12 Laporan Evaluasi SAKIP -7+7+7 Laporan Evaluasi Pelaksanaan SPIP -6+3+6 Laporan Evaluasi RB dan ZI -14+17+12 Laporan Evaluasi LHKPN dan LHKASN
	4356	PENGLOLAAN DATA DAN INFORMASI				40.860.000.000	36.966.011.000	-3.893.989.000	
	4356.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal		1.071	Layanan, Laporan, Dokumen	40.860.000.000	36.966.011.000	-3.893.989.000	
		<b>Indikator KRO :</b>							
		01 Persentase jumlah Layanan Manajemen Internal Pusat Data dan Informasi yang sesuai dengan ketentuan		100	%				Jayanan BMN -Jayanan Perkantoran
	4356.EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi Bawaslu		551	Layanan, Laporan, Dokumen	18.680.000.000	19.245.096.000	565.096.000	
		<b>Komponen Input :</b>							
Pencegahan, Parmas, dan Humas		101 Fasilitas dan pembinaan hubungan masyarakat dan media massa	Jumlah laporan fasilitas dan pembinaan hubungan masyarakat dan media massa	1	Laporan Media	1.500.000.000	1.500.000.000	0	

Pencegahan, Parmas, dan Humas		102	Pelaksanaan pemberitaan, publikasi dan pendokumentasian	Jumlah pelaksanaan pemberitaan, publikasi dan pendokumentasian	1	Berita	2.500.000.000	2.500.000.000	0	Berita dan konten media sosial
Pencegahan, Parmas, dan Humas		103	Fasilitasi dan pembinaan penyelenggaraan kehumasan	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan penyelenggaraan kehumasan	1	Laporan / semester	1.000.000.000	1.000.000.000	0	
Pencegahan, Parmas, dan Humas		201	Pengelolaan kehumasan, peliputan dan dokumentasi serta informasi publik Bawaslu Provinsi	Jumlah laporan pengelolaan kehumasan, peliputan dan dokumentasi	34	Laporan	3.400.000.000	4.882.310.000	1.482.310.000	Keterbukaan informasi publik (Indikator IKU) 1. Laporan pengelolaan informasi yang dipublikasikan dalam mendukung keterbukaan informasi publik persemester 2. Laporan hasil evaluasi kehumasan meliputi peliputan dan dokumentasi 3. Laporan pengelolaan web Bawaslu provinsi 4. Laporan supervisi dan monitoring pengelolaan kehumasan, peliputan dan dokumentasi serta informasi ke Kab/Kota
Pencegahan, Parmas, dan Humas		301	Pengelolaan kehumasan, peliputan dan dokumentasi serta informasi publik Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pengelolaan kehumasan, peliputan dan dokumentasi	514	Laporan	10.280.000.000	9.362.786.000	-917.214.000	1. Laporan pengelolaan informasi yang dipublikasikan dalam mendukung keterbukaan informasi publik persemester 2. Laporan hasil evaluasi kehumasan meliputi peliputan dan dokumentasi 3. Laporan pengelolaan web Bawaslu Kab/Kota
	4356.EBA.963		<b>Layanan Data dan Informasi</b>		520	Layanan, Laporan, Dokumen	22.180.000.000	17.720.915.000	-4.459.085.000	
			<b>Komponen Input :</b>							
Penanganan Pelanggaran dan Datin		101	Fasilitasi pengembangan sistem informasi terintegrasi	Jumlah dokumen pengembangan sistem informasi terintegrasi	1	Dokumen	3.500.000.000	3.500.000.000	0	
Penanganan Pelanggaran dan Datin		102	Pemetaan dan desain arsitektur sistem informasi kepemiluan	Jumlah dokumen desain arsitektur sistem informasi kepemiluan	1	Dokumen	500.000.000	500.000.000	0	
Penanganan Pelanggaran dan Datin		103	Penyediaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi	Jumlah unit infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi	1	Unit	500.000.000	500.000.000	0	
Penanganan Pelanggaran dan Datin		104	Pengelolaan dan pembinaan PPID Bawaslu	Jumlah dokumen PPID Bawaslu	1	Dokumen	2.000.000.000	2.000.000.000	0	
Penanganan Pelanggaran dan Datin		105	Fasilitasi dan pembinaan penyelenggaraan layanan data dan informasi	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan penyelenggaraan layanan data dan informasi	1	Laporan	2.000.000.000	2.000.000.000	0	
Penanganan Pelanggaran dan Datin		201	Pengelolaan dan pelayanan data dan informasi publik Bawaslu Provinsi	Jumlah pengelolaan dan pelayanan data dan informasi publik yang tersedia	1	Laporan	3.400.000.000	2.818.023.000	-581.977.000	1. Laporan pengelolaan dan pengembangan PPID persemester 2. Laporan supervisi dan monitoring pengelolaan dan pelayanan data dan informasi publik ke Kab/Kota
Penanganan Pelanggaran dan Datin		301	Pengelolaan dan pelayanan data dan informasi publik Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pengelolaan dan pengembangan PPID	514	Laporan	10.280.000.000	6.402.892.000	-3.877.108.000	Semester
	6849		<b>PENGLOLAAN KEUANGAN, BMN, DAN UMUM</b>				1.275.329.256.000	1.269.607.092.000	-5.722.164.000	
	6849.EBA		<b>Layanan Dukungan Manajemen Internal</b>		1.653	Layanan, Laporan, Dokumen	1.137.401.256.000	1.134.921.311.000	-2.479.945.000	
			<b>Indikator KRO :</b>							
		01	Persentase jumlah Layanan Manajemen Internal Biro Keuangan dan BMN yang sesuai dengan ketentuan		100	%				Jayanan BMN Jayanan Perkantoran
		02	Persentase jumlah Layanan Manajemen Internal Biro Hukum dan Humas yang sesuai dengan ketentuan		100	%				Jayanan Hukum Jayanan Bantuan Hukum Jayanan Humas dan informasi
		03	Persentase jumlah Layanan Manajemen Internal Biro Perencanaan dan Organisasi yang sesuai dengan ketentuan		100	%				Jayanan umum
		04	Persentase jumlah Layanan Manajemen Internal Biro SDM dan Umum yang sesuai dengan ketentuan		100	%				Jayanan Protokol Jayanan umum
	6849.EBA.956		<b>Layanan BMN</b>		550	Layanan, Laporan, Dokumen	14.610.000.000	12.130.055.000	-2.479.945.000	
			<b>Komponen Input :</b>							
SDM, Organisasi, dan Diklat		101	Penyusunan rencana kebutuhan BMN (RKBMN)	Jumlah laporan perencanaan pengadaan dan pemeliharaan BMN	1	Laporan	1.000.000.000	1.000.000.000	0	
SDM, Organisasi, dan Diklat		102	Fasilitasi penatausahaan BMN	Jumlah laporan penatausahaan BMN	1	Laporan	2.500.000.000	2.500.000.000	0	1. Laporan semester 2 2. Laporan Tahunan 1 3. Laporan Rekon Bulanan 12 4. Laporan Wasdal 1 5. Laporan Pengelolaan BMN per semester 2
SDM, Organisasi, dan Diklat		201	Pembinaan dan pengelolaan BMN Bawaslu Provinsi	Jumlah laporan pembinaan dan pengelolaan BMN yang sesuai dengan ketentuan	34	Laporan	3.400.000.000	2.854.220.000	-545.780.000	1. Laporan inventarisasi aset persemester 2. Laporan SIMAK BMN persemester 3. Laporan Pembinaan (bimtek) pengelolaan BMN ke Kab/Kota 4. Laporan supervisi dan monitoring pengelolaan BMN ke Kab/Kota
SDM, Organisasi, dan Diklat		301	Pengelolaan BMN Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah laporan inventarisasi aset	514	Laporan	7.710.000.000	5.775.835.000	-1.934.165.000	Semesteran
	6849.EBA.959		<b>Layanan Protokol</b>		3	Layanan, Laporan, Dokumen	5.300.000.000	5.300.000.000	0	
			<b>Komponen Input :</b>							
SDM, Organisasi, dan Diklat		101	Penyelenggaraan dan koordinasi keamanan kantor	Jumlah dokumen penyelenggaraan dan koordinasi keamanan kantor	1	Dokumen	800.000.000	939.380.000	139.380.000	
SDM, Organisasi, dan Diklat		102	Penyelenggaraan keprotokolan	Jumlah bulan fasilitasi Ketua dan Anggota, serta JPT Madya (Sekjen, Deputi, dan Irtama)	1	Bulan	3.500.000.000	3.436.500.000	-63.500.000	
SDM, Organisasi, dan Diklat		103	Fasilitasi dan pembinaan penyelenggaraan keprotokolan	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan penyelenggaraan keprotokolan	1	Laporan/ Semester	1.000.000.000	924.120.000	-75.880.000	
	6849.EBA.962		<b>Layanan Umum</b>		2	Layanan, Laporan, Dokumen	2.000.000.000	2.000.000.000	0	
			<b>Komponen Input :</b>							
SDM, Organisasi, dan Diklat		101	Fasilitasi pengadaan barang dan jasa	Jumlah paket pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan	1	Paket Pekerjaan	1.000.000.000	1.015.106.000	15.106.000	

SDM, Organisasi, dan Diklat	102	Facilitasi dan pembinaan penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa	Jumlah laporan fasilitas dan pembinaan penyelenggaraan bidang pengadaan dan jasa	1	Laporan/ Semester	1.000.000.000	984.894.000	-15.106.000	Termasuk Pengembangan Maturitas UKPBJ
6849.EBA.994		Layanan Perkantoran		1.098	Layanan, Laporan, Dokumen	1.115.491.256.000	1.115.491.256.000	0	
		<b>Komponen Input :</b>							
Operasional	001	Gaji dan tunjangan	Persentase penyelesaian pembayaran gaji dan tunjangan ASN yang tepat waktu	549		441.074.768.000	441.074.768.000	0	
Operasional	002	Operasional dan pemeliharaan kantor	Persentase penyelesaian pembayaran gaji pegawai kontrak yang tepat waktu	549		674.416.488.000	674.416.488.000	0	
		A) Honorarium Tenaga Kontrak Bawastu				30.787.907.000	12.871.707.000	-17.916.200.000	
		B) Honorarium Pengelola Keuangan				1.004.040.000	1.004.040.000	0	
		C) Operasional Penanganan Pandemi				363.600.000	363.600.000	0	
		D) Asuransi Kementerian/Lembaga				8.000.000	86.000.000	88.000.000	
		E) Langganan Daya dan Jasa				5.250.000.000	5.250.000.000	0	
		F) Pemeliharaan Kendaraan Bermotor				2.500.000.000	2.500.000.000	0	
		G) Pemeliharaan Inventaris Kantor				500.000.000	1.000.000.000	500.000.000	
		H) Pemeliharaan Gedung dan Bangunan				1.000.000.000	1.000.000.000	0	
		I) Pengadaan Keperluan Sehari-hari Perkantoran				950.000.000	950.000.000	0	
		J) Jasa Pos Giro dan Serifikat				200.000.000	200.000.000	0	
		K) Pengadaan Obat-obatan				200.000.000	200.000.000	0	
		L) Sewa Peralatan Insidentil/Kegiatan				250.000.000	250.000.000	0	
		M) Pengadaan Pakaian Dinas				725.000.000	725.000.000	0	
		N) Sewa Gedung Kantor dan Kendaraan Operasional				9.500.000.000	9.500.000.000	0	
		O) Jasa Pengamanan dan Kebersihan Kantor				6.250.000.000	6.250.000.000	0	
		P) Jamuan Tamu				950.000.000	950.000.000	0	
		Q) Service Charge				500.000.000	500.000.000	0	
		R) Internet				4.000.000.000	4.000.000.000	0	
		S) Operasional Kedepuitan Bidang Administrasi dan Biro Perencanaan dan Organisasi				269.450.000	269.450.000	0	
		T) Operasional Biro Keuangan dan BMN				199.675.000	199.675.000	0	
		U) Operasional Biro Hukum dan Humas				228.200.000	228.200.000	0	
		V) Operasional Biro SDM dan Umum				851.250.000	851.250.000	0	
		W) Operasional Inspektoral				208.325.000	208.325.000	0	
		X) Operasional Pusdatin				85.575.000	85.575.000	0	
		Y) Operasional Puslitbangdiklat				138.550.000	138.550.000	0	
		Z) Operasional dan Pemeliharaan Kantor BFPP				179.300.000	179.300.000	0	
		ZA) Operasional Biro FPSPP				159.425.000	159.425.000	0	
		ZB) Operasional Biro FPSPP				118.175.000	118.175.000	0	
		BA) Operasional dan pemeliharaan kantor Provinsi/Kab./Kota				607.040.016.000	624.368.216.000	17.328.200.000	
6849.EBB		Layanan Sarana dan Prasarana Internal		1.654	Unit, M2, Paket	48.278.000.000	53.094.218.000	4.816.218.000	
		<b>Indikator KRO :</b>							
	01	Persentase jumlah Layanan Sarana dan Prasarana Internal Biro SDM dan Umum yang sesuai dengan ketentuan		100	%				
6849.EBB.951		Layanan Sarana Internal		1.105	Unit, M2, Paket	30.398.000.000	42.518.827.000	12.120.827.000	
		<b>Komponen Input :</b>							
SDM, Organisasi, dan Diklat	101	Pengadaan kendaraan bermotor	Jumlah pengadaan kendaraan bermotor	7	Unit	4.914.000.000	3.510.000.000	-1.404.000.000	
SDM, Organisasi, dan Diklat	102	Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	Jumlah pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	1	Unit	1.750.000.000	1.214.085.000	-535.915.000	
SDM, Organisasi, dan Diklat	103	Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran	Jumlah pengadaan peralatan fasilitas perkantoran	1	Unit	1.500.000.000	1.191.900.000	-308.100.000	
SDM, Organisasi, dan Diklat	201	Pengadaan kendaraan bermotor Bawastu Provinsi	Jumlah pengadaan kendaraan bermotor	0	Unit	0	0	0	
SDM, Organisasi, dan Diklat	202	Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi Bawastu Provinsi	Jumlah pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	34	Unit	2.550.000.000	3.628.456.000	1.078.456.000	
SDM, Organisasi, dan Diklat	203	Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran Bawastu Provinsi	Jumlah pengadaan peralatan fasilitas perkantoran	34	Unit	4.264.000.000	2.406.411.000	-1.857.589.000	
SDM, Organisasi, dan Diklat	301	Pengadaan kendaraan bermotor Bawastu Kabupaten/Kota	Jumlah pengadaan kendaraan bermotor	0	Unit	0	0	0	
SDM, Organisasi, dan Diklat	302	Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi Bawastu Kabupaten/Kota	Jumlah pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	514	Unit	7.710.000.000	16.712.589.000	9.002.589.000	
SDM, Organisasi, dan Diklat	303	Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran Bawastu Kabupaten/Kota	Jumlah pengadaan peralatan fasilitas perkantoran	514	Unit	7.710.000.000	13.855.386.000	6.145.386.000	
6849.EBB.971		Layanan Prasarana Internal		549	Unit, M2, Paket	17.880.000.000	10.575.391.000	-7.304.609.000	
		<b>Komponen Input :</b>							
SDM, Organisasi, dan Diklat	101	Pembangunan/renovasi gedung dan bangunan	Jumlah pembangunan/ renovasi gedung dan bangunan	1	Unit	2.500.000.000	4.748.015.000	2.248.015.000	
SDM, Organisasi, dan Diklat	102	Pengadaan tanah untuk pembangunan/ renovasi gedung dan bangunan	Jumlah pengadaan tanah untuk pembangunan/ renovasi gedung dan bangunan	0	Unit	0	0	0	
SDM, Organisasi, dan Diklat	201	Pembangunan/ renovasi gedung dan bangunan Bawastu Provinsi	Jumlah pembangunan/ renovasi gedung dan bangunan	34	Unit	5.100.000.000	3.764.041.000	-1.335.959.000	
SDM, Organisasi, dan Diklat	202	Pengadaan tanah untuk pembangunan/ renovasi gedung dan bangunan Bawastu Provinsi	Jumlah pengadaan tanah untuk pembangunan/ renovasi gedung dan bangunan	0	Unit	0	0	0	
SDM, Organisasi, dan Diklat	301	Pembangunan/ renovasi gedung dan bangunan Bawastu Kabupaten/Kota	Jumlah pembangunan/ renovasi gedung dan bangunan	514	Unit	10.280.000.000	2.063.335.000	-8.216.665.000	
SDM, Organisasi, dan Diklat	302	Pengadaan tanah untuk pembangunan/ renovasi gedung dan bangunan Bawastu Kabupaten/Kota	Jumlah pengadaan tanah untuk pembangunan/ renovasi gedung dan bangunan	0	Unit	0	0	0	
6849.EBD		Layanan Manajemen Kinerja Internal			Dokumen, Layanan, Laporan	89.650.000.000	81.591.563.000	-8.058.437.000	
		<b>Indikator KRO :</b>							

		01	Persentase Jumlah Layanan Manajemen Kinerja Internal Biro Perencanaan dan Organisasi yang sesuai dengan ketentuan		100	%				Jayanan Perencanaan dan Penganggaran -Jayanan Pemantauan dan Evaluasi -Jayanan Reformasi Kinerja
	6849.EBD.952		Layanan Perencanaan dan Penganggaran		558	Dokumen, Layanan, Laporan	27.270.000.000	21.774.179.000	-5.495.821.000	
			<b>Komponen Input :</b>							
SDM, Organisasi, dan Diklat		101	Penyusunan rencana strategis (Renstra) dan rencana kerja (Renja) Bawaslu	Jumlah dokumen Renstra dan Renja Bawaslu yang disusun tepat waktu	3	Dokumen	500.000.000	500.000.000	0	1. Renstra Sekjen 2. Renstralembaga 3. Renja
SDM, Organisasi, dan Diklat		102	Penyusunan rencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga (RKA-KL)	Jumlah dokumen RKAKL Bawaslu yang disusun tepat waktu	2	Dokumen	3.000.000.000	3.000.000.000	0	
SDM, Organisasi, dan Diklat		103	Fasilitasi penyusunan pedoman dan penelitian rencana kerja dan anggaran	Jumlah pedoman dan dokumen hasil penelitian dan reviu	2	Dokumen	750.000.000	750.000.000	0	1. Pokok-pokok kebijakan 2. Laporan penrev
SDM, Organisasi, dan Diklat		104	Fasilitasi dan koordinasi dengan mitra kerja	Jumlah laporan fasilitasi koordinasi dengan mitra kerja	1	Laporan	1.500.000.000	1.500.000.000	0	
SDM, Organisasi, dan Diklat		105	Fasilitasi dan pembinaan perencanaan dan penganggaran	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan perencanaan dan penganggaran	2	Laporan / Semester	1.000.000.000	1.000.000.000	0	
SDM, Organisasi, dan Diklat		201	Penyusunan rencana kerja dan anggaran Bawaslu Provinsi	Jumlah dokumen rencana kerja dan anggaran	34	Dokumen	5.100.000.000	3.057.412.000	-2.042.588.000	1. Dokumen Renja dan Renja Perubahan 2. Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKAKL) dan revisi anggaran
SDM, Organisasi, dan Diklat		301	Penyusunan rencana kerja dan anggaran Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen rencana kerja dan anggaran	514	Dokumen	15.420.000.000	11.966.767.000	-3.453.233.000	
	6849.EBD.953		Layanan Pemantauan dan Evaluasi		563	Dokumen, Layanan, Laporan	24.520.000.000	18.216.114.000	-6.303.886.000	
			<b>Komponen Input :</b>							
SDM, Organisasi, dan Diklat		101	Penyusunan laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan anggaran Bawaslu	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi	4	Laporan / triwulanan	1.500.000.000	1.500.000.000	0	
SDM, Organisasi, dan Diklat		102	Pembinaan rencana penyerapan anggaran	Jumlah dokumen rencana penyerapan anggaran	4	Laporan / triwulanan	500.000.000	500.000.000	0	
SDM, Organisasi, dan Diklat		103	Penyusunan dan implementasi SAKIP	Jumlah dokumen rencana kinerja tahunan (RKT), perjanjian kinerja dan perjanjian kinerja perubahan, LKIP, rencana aksi, dan SK-IKU	5	Dokumen	1.000.000.000	1.000.000.000	0	
SDM, Organisasi, dan Diklat		104	Fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan evaluasi program dan anggaran Bawaslu	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan evaluasi program dan anggaran Bawaslu	2	Laporan / semester	1.000.000.000	1.000.000.000	0	
SDM, Organisasi, dan Diklat		201	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program Bawaslu Provinsi	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program	34	Dokumen	5.100.000.000	5.027.703.000	-72.297.000	1. Dokumen SAKIP (Renstra, RKT, Perjanjian Kinerja dan perjanjian kinerja perubahan, Rencana Aksi, LKIP, SK-IKU) 2. Laporan Rencana Penyerapan Anggaran per triwulan 3. Laporan evaluasi kesesuaian pelaksanaan kinerja sesuai dengan rencana aksi, RKA, dan dokumen perencanaan lainnya 4. Laporan supervisi dan monitoring pelaksanaan program ke Kab/Kota
SDM, Organisasi, dan Diklat		301	Monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program	514	Dokumen	15.420.000.000	9.188.411.000	-6.231.589.000	
	6849.EBD.955		Layanan Manajemen Keuangan		562	Dokumen, Layanan, Laporan	29.020.000.000	32.998.776.000	3.978.776.000	
			<b>Komponen Input :</b>							
SDM, Organisasi, dan Diklat		101	Fasilitasi pengelolaan perbendaharaan	Jumlah laporan fasilitasi pengelolaan, monitoring dan evaluasi pengelolaan perbendaharaan	2	Laporan	2.000.000.000	1.321.667.000	-678.333.000	1. Laporan Pertanggungjawaban Bendahara LPJ (12 bulan) 2. Laporan Layanan Perbendaharaan (12 bulan)
SDM, Organisasi, dan Diklat		102	Fasilitasi verifikasi dan pelaksanaan anggaran	Jumlah laporan fasilitasi verifikasi dan pelaksanaan anggaran	2	Laporan	1.500.000.000	2.024.507.000	524.507.000	1. Laporan Verifikasi (12 bulan) 2. Laporan Pelaksanaan Anggaran ( dilaporkan ke Ketua Bawaslu 12 bulan)
SDM, Organisasi, dan Diklat		103	Fasilitasi pengelolaan akuntansi dan pelaporan	Jumlah laporan fasilitasi pengelolaan akuntansi dan pelaporan	8	Laporan	2.500.000.000	2.483.701.000	-16.299.000	1. lapoiran Keuangan ( Rekon dgn KPPN 12 Bulan) 2. Laporan tahunan (diserahkan ke BPK dan Kemenkeu) 3. laporan semester dan triwulan ( Diserahkan Ke BPK dan Kemenkeu)
SDM, Organisasi, dan Diklat		104	Fasilitasi dan pembinaan pengelolaan Keuangan dan BMN	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan pengelolaan keuangan dan BMN	2	Laporan / semester	2.500.000.000	2.670.125.000	170.125.000	
SDM, Organisasi, dan Diklat		201	Pembinaan dan pengelolaan administrasi keuangan Bawaslu Provinsi	Jumlah dokumen pembinaan dan pengelolaan administrasi keuangan	34	Dokumen	5.100.000.000	7.428.151.000	2.328.151.000	1. Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) bendahara pengeluaran bulanan 2. Laporan keuangan semesteran
SDM, Organisasi, dan Diklat		301	Pengelolaan administrasi keuangan Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pembinaan dan pengelolaan administrasi keuangan	514	Dokumen	15.420.000.000	17.070.625.000	1.650.625.000	Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) bendahara pengeluaran pembantu bulanan
	6849.EBD.974		Layanan Penyelenggaraan Kearsipan Bawaslu		552	Dokumen, Layanan, Laporan	8.840.000.000	8.602.494.000	-237.506.000	
			<b>Komponen Input :</b>							
SDM, Organisasi, dan Diklat		101	Pembinaan pengelolaan persuratan dan arsip	Jumlah laporan pembinaan pengelolaan persuratan dan arsip	2	Laporan /semester	1.000.000.000	1.000.000.000	0	
SDM, Organisasi, dan Diklat		102	Fasilitasi dan pembinaan penyelenggaraan kearsipan	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan penyelenggaraan kearsipan	2	Laporan / semester	1.000.000.000	1.000.000.000	0	
SDM, Organisasi, dan Diklat		201	Pembinaan dan pengelolaan ketatausahaan dan kearsipan Bawaslu Provinsi	Jumlah dokumen pembinaan dan pengelolaan ketatausahaan dan kearsipan	34	Dokumen	1.700.000.000	1.636.958.000	-63.042.000	
SDM, Organisasi, dan Diklat		301	Pengelolaan ketatausahaan dan kearsipan Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pembinaan dan pengelolaan ketatausahaan dan kearsipan	514	Dokumen	5.140.000.000	4.965.536.000	-174.464.000	
	6850		PENGLOLAAN ORGANISASI DAN SDM				105.832.561.000	121.616.843.000	15.784.282.000	
	6850.EBA		Layanan Dukungan Manajemen Internal		1.734	Layanan, Laporan, Dokumen	56.062.561.000	77.299.644.000	21.237.083.000	
			<b>Indikator KRO :</b>							

		01	Persentase jumlah layanan ketatausahaan dan administrasi yang tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan		100	%				Jayanan umum 1. Biro Ren & Organisasi; 2. Pusdatin; 3. Pusbang SDM & Kebijakan Strategis; 4. Inspektorat.
		02	Persentase jumlah Layanan Manajemen Internal Biro Hukum dan Humas yang sesuai dengan ketentuan		100	%				Jayanan Hukum -Jayanan Bantuan Hukum
	6850.EBA.957	Layanan Hukum			1.131	Layanan, Laporan, Dokumen	16.680.000.000	20.467.152.000	3.787.152.000	
		<b>Komponen Input :</b>								
Hukum dan Penyelesaian Sengketa		101	Fasilitasi penyusunan dan evaluasi peraturan Bawaslu, produk hukum non peraturan Bawaslu dan analisis hukum peraturan perundang-undangan.	Jumlah rancangan peraturan Bawaslu dan produk hukum non peraturan Bawaslu	1	Perbawaslu dan naskah akademis	3.000.000.000	3.000.000.000	0	- Mulai dari penyusunan, dokumentasi, sosialisasi, dan evaluasi; -2022: perbawaslu 18, naskah analisis 10 -2023: Perbawaslu 18, naskah analisis 11 -2024: perbawaslu 15, naskah analisis 12
Hukum dan Penyelesaian Sengketa		201	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan produk hukum di Bawaslu Provinsi	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan produk hukum yang diselenggarakan sesuai ketentuan	34	Laporan	1.700.000.000	2.409.172.000	709.172.000	1. Laporan hasil evaluasi pelaksanaan produk hukum 2. Laporan supervisi dan monitoring evaluasi pelaksanaan produk hukum ke Kab/Kota
Hukum dan Penyelesaian Sengketa		202	Diseminasi produk hukum di Bawaslu Provinsi	Laporan diseminasi produk hukum terkait kepemiluan	34	Laporan	1.360.000.000	1.942.695.000	582.695.000	
Hukum dan Penyelesaian Sengketa		203	Kajian hukum di Bawaslu Provinsi	Laporan kajian hukum	34	Laporan	340.000.000	972.005.000	632.005.000	Kajian untuk produk hukum dan non produk hukum
Hukum dan Penyelesaian Sengketa		301	Fasilitasi pengelolaan layanan hukum di Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil evaluasi pelaksanaan produk hukum dan layanan hukum	514	Laporan	5.140.000.000	6.098.658.000	958.658.000	
Hukum dan Penyelesaian Sengketa		302	Kajian hukum di Bawaslu Kabupaten/Kota	Laporan kajian hukum	514	Laporan	5.140.000.000	6.044.622.000	904.622.000	Kajian untuk produk hukum dan non produk hukum
	6850.EBA.962	Layanan Umum			18	Layanan, Laporan, Dokumen	26.342.561.000	37.893.610.000	11.551.049.000	
		<b>Komponen Input :</b>								
SDM, Organisasi, dan Diklat		101	Koordinasi data dan Informasi, rencana program dan anggaran, serta evaluasi dan pelaporan kinerja, administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, dan umum lingkup Kedeputan Administrasi	Jumlah dokumen koordinasi data dan informasi, rencana program dan anggaran, serta evaluasi dan pelaporan kinerja, administrasi keuangan, administrasi kepegawaian umum lingkup Deputi bidang Administrasi	1	Laporan Bulanan	1.500.000.000	1.500.000.000	0	
Ketua dan Seluruh Divisi		102	Fasilitasi urusan ketatausahaan Pimpinan	Jumlah laporan urusan ketatausahaan dan kerumah tanggaan Pimpinan dan Sekretaris Jendral	1	Laporan	6.000.000.000	6.000.000.000	0	
Hukum dan Penyelesaian Sengketa		103	Koordinasi data dan informasi, rencana program dan anggaran, serta evaluasi dan pelaporan kinerja, administrasi keuangan, administrasi kepegawaian dan umum di lingkup Kedeputan Teknis Pengawasan Pemilu	Jumlah dokumen koordinasi data dan informasi, rencana program dan anggaran, serta evaluasi dan pelaporan kinerja, administrasi keuangan, administrasi kepegawaian dan umum di lingkup Deputi bidang Teknis	1	Dokumen	1.500.000.000	1.500.000.000	0	
Penanganan Pelanggaran dan Datin		104	Koordinasi data dan informasi, rencana program dan anggaran, serta evaluasi dan pelaporan kinerja, administrasi keuangan, administrasi kepegawaian dan umum di lingkup Pusat Data dan Informasi	Jumlah dokumen koordinasi data dan informasi, rencana program dan anggaran, serta evaluasi dan pelaporan kinerja, administrasi keuangan, administrasi kepegawaian dan umum di lingkup Pusat Data dan Informasi	1	Dokumen	200.000.000	200.000.000	0	
SDM, Organisasi, dan Diklat		105	Koordinasi data dan informasi, rencana program dan anggaran, serta evaluasi dan pelaporan kinerja, administrasi keuangan, administrasi kepegawaian dan umum di lingkup Pusat Pengembangan SDM dan Kebijakan Strategis	Jumlah dokumen koordinasi data dan informasi, rencana program dan anggaran, serta evaluasi dan pelaporan kinerja, administrasi keuangan, administrasi kepegawaian dan umum di lingkup Pusat Pengembangan SDM dan Kebijakan Strategis	1	Dokumen	200.000.000	200.000.000	0	
SDM, Organisasi, dan Diklat		106	Koordinasi data dan Informasi, rencana program dan anggaran, serta evaluasi dan pelaporan kinerja, administrasi keuangan, administrasi kepegawaian dan umum lingkup Inspektorat Utama	Jumlah dokumen koordinasi data dan informasi, rencana program dan anggaran, serta evaluasi dan pelaporan kinerja, administrasi keuangan, administrasi kepegawaian dan umum di lingkup Inspektorat Utama	12	Dokumen/ Laporan	1.500.000.000	1.500.000.000	0	- 8 Dokumen: Renstra, Renja, Lakip, Perkin, Laporan evaluasi Bulanan, Dokumen RAB, Dokumen Revisi Anggaran, Capaian output. - 6 Laporan: (2 Laporan semester keuangan, 2 Laporan semester Kepegawaian dan Umum)
Ketua dan Seluruh Divisi		107	Fasilitasi koordinasi kegiatan Pimpinan	Jumlah laporan koordinasi kegiatan Pimpinan	1	Laporan / triwulanan	7.000.000.000	7.000.000.000	0	
Ketua		108	Fasilitasi pembinaan dan penguatan kelembagaan Bawaslu			Laporan	2.452.561.000	2.452.561.000	0	
Ketua Provinsi		201	Fasilitasi pembinaan dan penguatan kelembagaan Bawaslu Provinsi			Laporan	850.000.000	4.452.423.000	3.602.423.000	
Ketua Kab/Kota		301	Fasilitasi pembinaan dan penguatan kelembagaan Bawaslu Kabupaten/Kota			Laporan	5.140.000.000	13.088.626.000	7.948.626.000	
	6850.EBA.969	Layanan Bantuan Hukum			585	Layanan, Laporan, Dokumen	13.040.000.000	18.938.882.000	5.898.882.000	
		<b>Komponen Input :</b>								
Hukum dan Penyelesaian Sengketa		101	Fasilitasi dan pembinaan layanan bantuan hukum	Jumlah laporan pendampingan dan/atau advokasi	1	Laporan	1.500.000.000	1.500.000.000	0	
Hukum dan Penyelesaian Sengketa		102	Fasilitasi dan koordinasi pengelolaan dan pelayanan JDIH	Jumlah fasilitasi dan koordinasi pengelolaan dan pelayanan JDIH	1	Laporan	1.500.000.000	1.500.000.000	0	- Laporan JDIH, 2022 (5), 2023 (5), 2024 (5); - Laporan Perpustakaan 2022 s.d 2024 masing2 1 laporan; - Laporan Pengadaan Dokumen Hukum, 2022 (3), 2023 (5), 2024 (5)
Hukum dan Penyelesaian Sengketa		103	Fasilitasi dan pembinaan penyelenggaraan bidang hukum dan bantuan hukum	Jumlah kegiatan fasilitasi dan pembinaan penyelenggaraan bidang hukum dan bantuan hukum	1	Laporan/ semester	1.500.000.000	1.500.000.000	0	

Hukum dan Penyelesaian Sengketa	201	Pendampingan dan layanan bantuan hukum di Bawaslu Provinsi	Jumlah laporan advokasi pelanggaran dan pidana pemilu/pemilihan yang diselenggarakan sesuai ketentuan	34	Laporan	1.700.000.000	1.346.377.000	-353.623.000	
Hukum dan Penyelesaian Sengketa	202	Pembinaan bantuan hukum di Bawaslu Provinsi	Jumlah laporan pembinaan bantuan hukum di Bawaslu Provinsi	34	Laporan	1.700.000.000	1.371.482.000	-328.518.000	Pelatihan, Sosialisasi, peningkatan kapasitas, jasa konsultan, penyelesaian kasus hukum
Hukum dan Penyelesaian Sengketa	301	Bantuan hukum di Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah laporan advokasi pelanggaran dan pidana pemilu/pemilihan yang diselenggarakan sesuai ketentuan	514	Laporan	5.140.000.000	11.721.023.000	6.581.023.000	Hanya paket jasa konsultan (advokat)
<b>6850.EBC</b>		<b>Layanan Manajemen SDM Internal</b>		<b>14.434</b>	<b>Orang, Layanan</b>	<b>49.770.000.000</b>	<b>44.317.199.000</b>	<b>-5.452.801.000</b>	
		<b>Indikator KRO :</b>							
	01	Persentase jumlah Layanan Manajemen Internal Biro SDM dan Umum yang sesuai dengan ketentuan		100	%				-Jayanan manajemenSDM -Jayanan umum (faskor pimpinan)
	02	Persentase jumlah Layanan Manajemen Internal Pusat Pengembangan SDM dan Kebijakan Strategis yang sesuai dengan ketentuan		100	%				-Jayanan pendidikan dan pelatihan
<b>6850.EBC.954</b>		<b>Layanan Manajemen SDM</b>		<b>13.752</b>	<b>Orang, Layanan</b>	<b>35.020.000.000</b>	<b>29.567.199.000</b>	<b>-5.452.801.000</b>	
		<b>Komponen Input :</b>							
SDM, Organisasi, dan Diklat	101	Rekrutmen, pengangkatan, dan evaluasi ASN	Jumlah Aparatur Sipil Negara	350	Orang	2.000.000.000	2.442.548.000	442.548.000	
SDM, Organisasi, dan Diklat	102	Rekrutmen, pengangkatan dan evaluasi Kepala Sekretariat Bawaslu	Rekrutmen, pengangkatan dan evaluasi Kepala Sekretariat Bawaslu	108	Orang	1.500.000.000	1.292.050.000	-207.950.000	
SDM, Organisasi, dan Diklat	103	Fasilitasi, pembinaan dan pengembangan karir jabatan struktural	Jumlah aparatur sekretariat (PNS dan Non-PNS) yang dilakukan pembinaan dan evaluasi	10.136	Orang	3.000.000.000	2.632.510.000	-367.490.000	
SDM, Organisasi, dan Diklat	104	Fasilitasi, pembinaan dan pengembangan karir jabatan fungsional		500	Orang	3.000.000.000	2.735.855.000	-264.145.000	
SDM, Organisasi, dan Diklat	105	Penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan	Jumlah dokumen analisis jabatan dan analisis beban kerja	3	Dokumen	2.000.000.000	2.397.037.000	397.037.000	1. Anjab 1 dokumen 2. Evjab 1 dokumen 3. Abk 1 dokumen
SDM, Organisasi, dan Diklat	106	Fasilitasi pembentukan, pembinaan dan evaluasi aparatur pengawas pemilu	Jumlah aparatur pengawas pemilu yang dilakukan pembinaan dan evaluasi	2.107	Orang	3.000.000.000	3.000.000.000	0	termasuk PAW
SDM, Organisasi, dan Diklat	201	Pembinaan SDM pengawas dan sekretariat Bawaslu Provinsi	Jumlah aparatur pengawas dan sekretariat yang dilakukan pembinaan	34	Orang	5.100.000.000	5.527.877.000	427.877.000	Seluruh pegawai provinsi
SDM, Organisasi, dan Diklat	301	Manajemen SDM pengawas dan sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah aparatur pengawas dan sekretariat yang dilakukan pembinaan	514	Orang	15.420.000.000	9.539.322.000	-5.880.678.000	Seluruh pegawai kabupaten/kota
<b>6850.EBC.996</b>		<b>Layanan Pendidikan dan Pelatihan</b>		<b>682</b>	<b>Orang, Layanan</b>	<b>14.750.000.000</b>	<b>14.750.000.000</b>	<b>0</b>	
		<b>Komponen Input :</b>							
SDM, Organisasi, dan Diklat	101	Penyusunan desain dan kurikulum nasional pendidikan dan pelatihan pengawas pemilu	Jumlah dokumen penyusunan desain dan kurikulum nasional pendidikan dan pelatihan pengawas pemilu serta penjaminan mutu diklat	2	Dokumen	1.000.000.000	1.000.000.000	0	
SDM, Organisasi, dan Diklat	102	Peningkatan kapasitas pengawas pemilu Bawaslu	Jumlah orang yang mendapatkan peningkatan kapasitas pengawas pemilu	150	Orang	4.000.000.000	4.000.000.000	0	Perlu konfirmasi
SDM, Organisasi, dan Diklat	103	Peningkatan kapasitas SDM Sekretariat Bawaslu	Jumlah orang yang mendapatkan peningkatan kapasitas di bidang administrasi dan teknis kepemiluan di Bawaslu dan Bawaslu Provinsi	75	Orang	4.000.000.000	4.000.000.000	0	Perlu konfirmasi
SDM, Organisasi, dan Diklat	104	Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kepemimpinan	Jumlah orang yang mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan, latsar, PKN, PKA, PKP	380	Orang	5.000.000.000	5.000.000.000	0	Perlu konfirmasi
SDM, Organisasi, dan Diklat	105	Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan jabatan fungsional tertentu	Jumlah orang yang mengikuti pendidikan dan pelatihan jabatan fungsional tertentu	75	Orang	750.000.000	750.000.000	0	Perlu konfirmasi
<b>TOTAL</b>						<b>7.103.821.817.000</b>	<b>7.103.821.817.000</b>	<b>0</b>	

7.103.821.817.000  
0

7.103.821.817.000  
0

0  
0